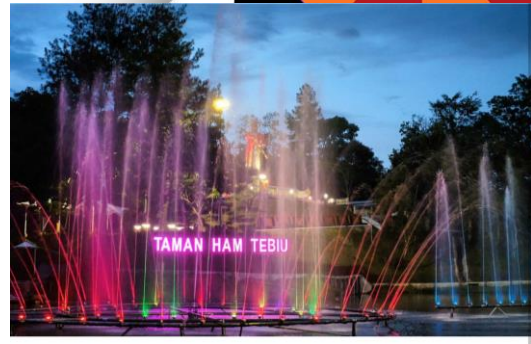




**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

Alamat : Jalan Tulip Nomor 2 Komplek Perkantoran
Pemda Liwa, Lampung Barat Telp (0728) 21216

RENCANA STRATEGIS(RENSTR)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan limpahkan Rahmat-Nya, maka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dapat terwujud.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan menjadi pegangan umum perencanaan dalam rangka menyusun Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

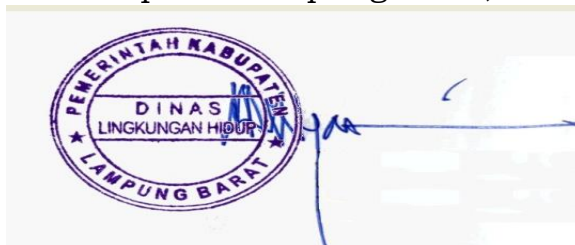
Untuk dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang baik diperlukan data dan informasi yang lengkap. Karena itu, dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini telah melibatkan seluruh Pejabat dan Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dengan diskusi yang mendalam serta terjadi komunikasi timbal balik antara pimpinan dan staf.

Sehingga tersusun keputusan-keputusan sistematis yang akhirnya menjadi dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Semoga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amien

L i w a, 15 November 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Barat,



MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.MH.

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730912 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD	9
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah.....	22
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.4. Tantangan dan Peluang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah.....	33
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS.....	36
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Peningkatan PD	37
3.2. Penentuan isu-isu strategis	45
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	51
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
5.1. Strategi	56
5.2. Kebijakan	57
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
5.1. Rencana Program dan Kegiatan	59
5.2. Indikatif Kinerja	66
5.3. Kelompok Sasaran	66
5.4. Pendanaan Indikatif	67

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN	68
BAB VIII. PENUTUP	70
Lampiran 1 : Pohon Kinerja 2023-2026	
Lampiran 2 : Cascading 2023-2026	
Lampiran 3 : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 4 tahun, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD).

Rancangan RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2023-2026 disusun dari hasil kajian (*Background Study*) dari pada ahli serta masukan dari Rancangan Awal Renstra Organisasi Perangkat Daerah untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih memerlukan masukan dari berbagai pihak yang tentunya memakan waktu yang cukup panjang. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang.

RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 sebagai perencanaan strategis kabupaten memuat penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun. Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Organisasi Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan kontribusi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.



Begitu pula halnya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang menangani masalah Manajemen sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup seperti pengaduan masyarakat terhadap lingkungan yang tercemar sebagai ujung tombak peningkatan dan terwujudnya lingkungan yang indah dan asri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kondisi masyarakat Lampung Barat pada umumnya bermata pencaharian di sektor pertanian serta sektor lain yang bertumpu kepada eksploitasi sumber daya alam (SDA) telah memicu deforestasi sebagian besar kawasan hutan serta rusaknya ekosistem. Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan kawasan lindung yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan yang terletak disisi taman nasional bukit Barisan selatan. Secara Keseluruhan daerah ini merupakan hulu dari sungai –sungai besar di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu Kabupaten Lampung Barat memegang peranan penting dalam sistem hidrologi provinsi Lampung, yaitu sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dari sungai besar, mendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan mempengaruhi keadaan iklim secara keseluruhan.

Dalam rangka menunjang hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Kawasan hutan yang kritis sudah pada tingkat yang mengakhawatirkan Kawasan hutan kritis menyebabkan erosi, banjir, tanah longsor, sedimentasi tinggi, penurunan kualitas air, fluktuasi debit air, juga mengakibatkan hilangnya plasma nutfah berkurangnya keanekaragaman hayati, rusaknya habitat satwa langka yang dilindungi sehingga satwa-satwa tersebut sering mengganggu permukiman penduduk.

Tutupan lahan mengalami pertumbuhan yang cenderung statis atau mengalami peningkatan yang tinggi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Barat wilayah administrasi terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan hutan (non budidaya). Kawasan hutan meliputi luasan mencapai 126.956,27 Ha atau sekitar 59,25% dari luas administrasi atau sekitar 61,5% dari luasan daratan, sedangkan sisanya sekitar 40,75% atau sekitar ±87.318,28 Ha merupakan kawasan budidaya. Selanjutnya berdasarkan revisi data terbaru luas administrasi Kabupaten Lampung Barat menjadi ±2.125,59 km² atau ±212212,559 Ha, sedangkan luas kawasan hutan menjadi ±106.067,24 Ha atau seluas ±49,9 % (±50%) dari luas administrasi Kabupaten Lampung Barat.

Penggunaan pestisida untuk Tanaman Hortikultura belum dilaksanakan secara bijaksana sehingga dapat mencemari air, udara, tanah serta residu pestisida dikawatirkan melebihi ambang toleransi. Lampung Barat berdasarkan data iklim yang terdapat di Stasiun Klimatologi Balik Bukit dan Belalau antara tahun 2012 s/d 2014 sebesar 2.388,2 mm pertahun. Pada tahun 2012 rata-rata curah hujan tahunan sebesar 1.966,1 mm pada tahun 2014 curah hujan rata-rata tahunan mencapai 2.526,1 mm. Kondisi geografis dan topografi dominan berbukit-bukit hingga terjal serta struktur tanah yang remah sehingga sangat peka sekali dengan erosi permukaan longsor.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, menurut data penduduk Tahun 2023 telah mencapai 310.990 jiwa yang bermukim di daerah perkotaan sampai pekon/kelurahan seperti Kecamatan Balik Bukit 2023 mencapai 64,372 jiwa, tumbuh dan berkembangnya pembangunan perkotaan sebagai eks kota, kota kecamatan dan kelurahan/pekon diakibatkan meningkatnya dan berkembangnya aktifitas penduduk, pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta seperti berkembangnya kegiatan usaha perdagangan, mulainya muncul usaha industri kecil, dan agro industri, pariwisata, usaha dibidang pertanian, perkebunan peternakan. Juga berkembangnya infrastruktur untuk memperlancar roda perekonomian.

Segala aktifitas kehidupan dan pembangunan diatas dituntut pula penataan dan pengelolaan lingkungan yang bersih, tata ruang hijau, yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan berbagai macam tanaman hias sehingga kelestarian alam dan lingkungan terjaga dan terciptanya lingkungan yang sehat.

Melihat uraian tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk dikelola secara bijaksana sehingga dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan sesuai dengan beberapa Misi Kabupaten Lampung Barat yaitu **"Memantapkan Infrastruktur dan konektivitas Antar Wilayah untuk mendukung Mitigasi Bencana & Berwawasan Lingkungan"** Sehingga fungsi Renstra ini sangatlah penting dalam rangka kelangsungan organisasi dalam mengembangkan diri dengan strategisnya.

Rencana Strategis harus disusun melalui proses yang dimulai dengan Penyusunan Tim, Penyiapan Rancangan, Penyajian oleh Tim yang mempunyai kompetensi untuk menyatukan persepsi perencanaan strategi guna terwujud sebuah Rencana Strategis untuk ditetapkan.

Hubungan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat berdasarkan hasil kajian evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023-2026 baik secara fisik maupun keuangan. Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2023-2026 dibuat dalam rangka untuk sebuah penyelarasan, keserasian, kesinambungan dan keterpaduan dalam pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan melalui pendekatan holistik yang mampu merangkum segenap potensi dan permasalahan pembangunan, menuangkan dalam suatu analisis kebijakan pembangunan, dan pada akhirnya merumuskan perencanaan pembangunan 4 Tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 06 tahun 1991 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

18. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan KLHS;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4)
31. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2023 -2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14)
32. Peraturan Bupati Lampung Barat Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023, Nomor 24 : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.
33. Surat Edaran 4/menlhk/setjen/KUM.I/4/2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dalam penyusunan Rencana Startegis (Renstra) dimaksud Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Memberikan arah pembangunan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026
2. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 4 (empat) tahun

b. Tujuan

Rencana Startegis Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026 disusun dengan tujuan :

1. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2017 – 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
3. Menjadi tolak ukur kinerja pembangunan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 4 (empat) tahun;
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematis Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 -2026, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan OPD dan Penentuan Isu-isu Strategis.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Pendanaan untuk 4 Tahun

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

BAB VIII PENUTUP

Lampiran I : Pohon Kinerja Tahun 2023-2026

Lampiran II : Cascading Tahun 2023-2026

Lampiran III : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Suatu organisasi harus mempunyai Tugas dan Fungsi agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu agar program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok yaitu “Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah” yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Sasaran Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat .

Dalam rangka menjalankan roda organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengendalian dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Perumusan program kerja rutin maupun pembangunan dari sumber data yang ada sebagai bahan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dinas lingkungan hidup lintas sektoral, propinsi, nasional dan internasional;
 - d. Fasilitasi pengembangan kegiatan kelembagaan serta forum masyarakat yang melakukan pelestarian lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai sistem pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
 - f. Perumusan petunjuk pembinaan dan pengembangan dinas lingkungan hidup serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas;
 - g. Pengoordinasian, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas lingkungan hidupguna pemecahan masalah dan tindak lanjutnya;

- h. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya;
- i. Pemberian masukan, usul, serta saran dan pertimbangan kepada bupati baik dalam menyusun kebijakan pemecahan masalah maupun dalam rangka pembinaan yang berkaitan dalam pengembangan dinas;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan dinas kepada pimpinan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan

Sekretaris

1. Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Penyiapan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
 - c. Perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
 - d. Pengoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas ;
 - e. Penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
 - f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - g. Penyusunan rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;

- h. Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana Pendapatan Domestik Brutodan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.;

Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana serta program kerja dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - d. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi dokumen dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - e. Penentuan daya dukung, daya tampung, baku mutu dan baku mutu sumber pencemar serta kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - f. Penyusunan kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme perizinan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;

- g. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) serta tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan daerah;
- h. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar, kualitas air, udara, tanah;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan;
- j. Pelakuan penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- k. Penyusunan kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- l. Pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran;
- m. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan bidang Lingkungan Hidup;
- o. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- p. Pengembangan pelaksanaan pemberian penghargaan daerah bidang Lingkungan Hidup;
- q. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- r. Pelaksanaan perlindungan, pencadangan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- t. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- u. Penetapan kebijakan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- v. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- w. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan



- x. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kebersihan

1. Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas didalam merumuskan, menyusun dan mengelola pelaksanaan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan, monitoring bidang kebersihan, meliputi layanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan serta pengelolaan sampah limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana serta program kerja dibidang kebersihan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan;
 - c. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - d. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - e. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - f. Pelakuan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - g. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - h. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - i. Pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - j. Pelakuan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - k. Pelakuan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - l. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - m. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

- n. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- o. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- p. penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- q. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- r. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- s. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- t. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- u. Penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. Penyelenggaraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- w. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- x. Penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- y. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- z. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - aa. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - bb. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - cc. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah bahan

- berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan;
- dd. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah bahan berbahaya dan beracundilakukan;
 - ee. Pelaksanaan perijinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
 - ff. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - gg. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pertamanan

1. Kepala Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pertamanan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana serta program kerja dibidang pertamanan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertamanan;
 - c. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dibidang pertamanan;
 - d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan pengelolaan pertamanan lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;
 - e. Penyusunan dan menyiapkan rencana operasional penataan, pemeliharaan pertamanan diwilayah Kabupaten;
 - f. Pengembangan kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta

menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas;

- g. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pertamanan sebagai pertanggung jawaban;
- h. Penyiapan bahan kebijakan operasional pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan;
- i. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- k. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- l. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- m. Penyusunan kegiatan penerangan jalan secara umum;
- n. Pelaksanaan inventarisasi jumlah titik lampu yang mengalami kerusakan;
- o. Pelaksanaan survey lokasi rencana pemasangan titik lampu jalan;
- p. Penyiapan bahan serta melaksanakan penataan taman, pemasangan dan perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan penerangan jalan secara umum;
- q. Penyiapan bahan serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan penataan taman serta jaringan penerangan jalan secara umum;
- r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan Seksi Penerangan jalan umum;
- s. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan



pemeliharaan Pengendalian dan Penataan Kota lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;

- t. Penyusunan dan menyiapkan rencana operasional dibidang Pengendalian dan Penataan Kota di wilayah Kabupaten;
- u. Pengembangan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas; dan
- v. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Jabatan Fungsional Substansi Koordinator Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi;
 2. Jabatan Fungsional Substansi Koordinator Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium; dan
 3. Jabatan Fungsional Substansi Koordinator Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan.
- d. Bidang Kebersihan, membawahi :
 1. Jabatan Fungsional Substansi Koordinator Sarana dan Prasarana Kebersihan;
 2. Jabatan Fungsional Substansi Koordinator Layanan Kebersihan; dan
 3. Jabatan Fungsional Substansi Koordinator Pengelolaan Limbah & Limbah B3.
- e. Bidang Pertamanan, membawahi :



1. Jabatan Fungsional Substansi Koordinator Pengelolaan Pertamanan;
 2. Jabatan Fungsional Substansi Koordinator Penerangan Jalan Umum; dan
 3. Jabatan Fungsional Substansi Koordinator Pengendalian dan Penataan Kota..
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat itu sendiri merupakan Unsur Penunjang Pemerintahan di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat melaksanakan dalam bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks tutupan Lahan (IKTL) beserta JAKSTRADA (Kebijakan Strategi Daerah) untuk mendukung program Adipura dan Kabupaten Konservasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Untuk lebih jelasnya Bagian Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Lampung Barat sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada lampiran Renstra ini.

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)

Berdasarkan Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Potensi Sumberdaya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting dalam rangka perubahan untuk suatu kemajuan yang disesuaikan pada kapasitas yang dimiliki. Dalam rangka menunjang program kerja dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat didukung oleh jumlah pegawai sebagai sumber daya

manusia tercatat sebanyak 254 (Dua Ratus Lima Puluh Empat) orang yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 33 Orang
2. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) = 20 Orang
3. Petugas Harian Lepas Petugas Kebersihan = 130 Orang
4. Petugas Harian Lepas Petugas Pertamanan = 26 Orang
5. Petugas Kebun Raya Liwa = 45 Orang

Potensi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tersebut diatas dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan, dari 33 Orang PNS tersebut dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Tabel Jumlah PNS
Berdasarkan Kepangkatan/Golongan**

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	IV	5	12%
2.	III	21	64%
3.	II	7	22%

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2023

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dari 33 orang PNS dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2023**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S2	8	22%
2.	S1	18	63%
3.	D-III	1	1 %
4.	SLTA	6	15%

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2023

3. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan yang pernah diikuti, maka dari Jumlah Pejabat Struktural sesuai eselon terdapat beberapa yang belum mengikuti Diklat Penjenjangan sebagai terlihat dalam Tabel dibawah ini :

**Tabel PNS
Berdasarkan Diklat Penjenjangan**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SPAMEN / PIM II	1	100%
2.	SPAMA/PIM III	2	33%
3.	ADUM/PIM IV	10	63%

2. Potensi Sarana dan Prasarana

Prasarana dan sarana yang dimiliki oleh suatu Instansi merupakan salah satu pendukung kinerja yang utama. Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023, prasarana dan sarana pendukung kinerja yang dimiliki adalah seperti yang diuraikan di dalam tabel berikut ini

Tabel 2.2. Rekapitulasi Prasarana dan Sarana Pendukung Kinerja

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	M2	114.001,55	14 Lokasi
2.	Alat Berat	Unit	36	Chain saw, Genset, Mesin Pencacah Sampah, Mesin Kompos, Excavator, Bulldoser
3.	Alat Angkutan, terdiri atas :	Unit	164	
	a Kendaraan			
	. Roda 4			
	- Dump Truck	Unit	0	
	- Armroll Truck	Unit	7	
	- Truk Tanki Air	Unit	1	
	- Mobil Sky Lift	Unit	1	



	- Pick Up	Unit	3	
	- Minibus	Unit	3	
	- Daubel cabin	Unit	1	
	- Kendaraan Laboratorium	Unit	2	
	↳ Kendaraan Roda 2			
	- Sepeda Motor	Unit	11	
	↳ Kendaraan Roda 3			
	- Sepeda Motor	Unit	29	
	↳ Gerobak Sampah	Unit	107	
4.	Alat Bengkel	Unit	3	Mesin Steam, Mesin Pengolah Sampah, dll
5.	Alat Pertanian dan Peternakan	Unit	45	Mesin Potong Rumput, Sprayer, dll
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit	2.196	Mesin Tik, Meja, Kursi, Komputer, Pri nter, Brankas, dll
7.	Alat Studio dan Komunikasi	Unit	11	Handy Cam, Camera, Wireless, dll
8.	Alat Laboratorium	Unit	863	PH Meter, GPS, Gelas Ukur, Mikroskop, dll
9.	Bangunan	Unit	54	Gedung



	Gedung			Kantor, Garasi, Taman, TPS, dll
10.	Bangunan Monumen	Unit	5	Bangunan Tugu
11.	Bangunan Air/Irigasi	Unit	23	Sarana Air Bersih, Sumur Resapan, dan Sumur Bor
12.	Instalasi, terdiri atas :	Unit	869	
	a Lampu . Penerangan Jalan	Unit	1.500	
	b Lampu Sorot	Unit	12	
	c Gardu Listrik	Unit	5	
13.	Jaringan, terdiri atas :	Unit	12	
	a PC Server	Unit	2	
	b PC Client	Unit	8	
	c Perangkat . Network	Unit	2	
14.	Asset Tetap Lainnya	Unit	45.390	Bibit pohon dan Tanaman
15.	Asset Lain-lain	Unit	1.262	Tong sampah, Pot bunga, dll

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023



Sedangkan untuk Potensi dan Kondisi Sumber Dana kegiatan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA-SKPD sedangkan untuk Tahun 2023-2026 alokasi dana diperuntukan kegiatan di 4 (Empat) bidang , 1 TPA Bahway dan 1 UPTD Kebun Raya Liwa yaitu :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
- c. Bidang Kebersihan
- d. Bidang Pertamanan

Dari uraian Potensi dan kondisi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan namun kondisi tersebut tidak menjadikan suatu halangan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta memaksimalkan potensi yang ada dalam meningkatkan kinerja yang maksimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat).

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

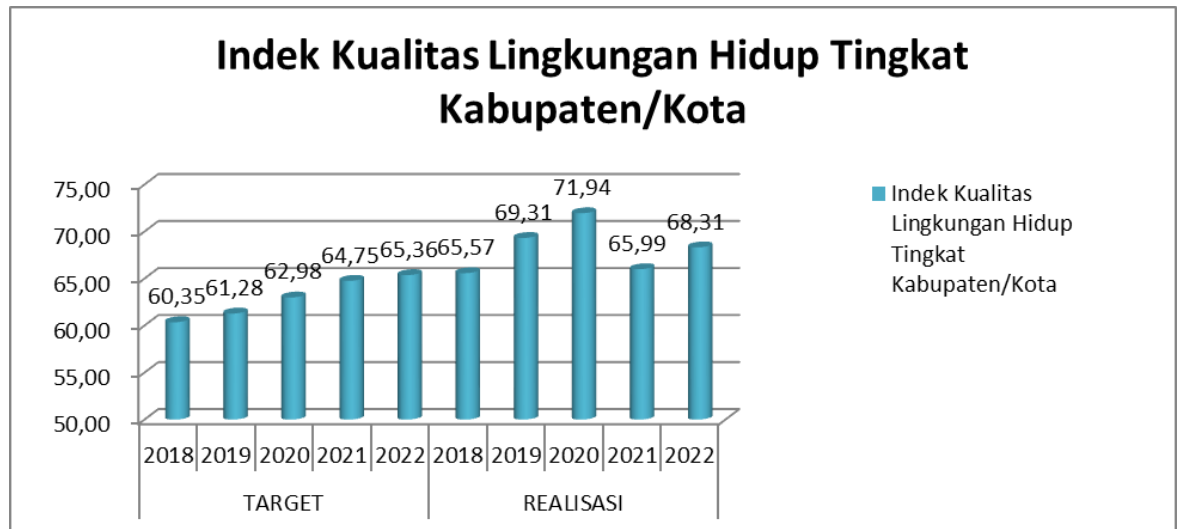
Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang telah dilaksanakan berjalan sesuai prosedur seperti pelayanan Pengelolaan Persampahan seperti Retribusi Sampah dan Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan agar tidak mencemari lingkungan sekitar yang mampu



memberikan pelayanan secara objektif, dan terlaksananya up dating data secara berkesinambungan dan secara umum telah tercapai sesuai target kinerja.

Untuk Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat 2017-2022



Sumber Data : Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022

1. Indikator kinerja pertama. Persentase yang ditangani beban pencemaran akibat aktivitas industri, rumah tangga dan mitigasi bencana serta data tutupan lahan dan alih fungsi lahan dan penataan hukum lingkungan serta meningkatnya penanganan kasus pengaduan lingkungan adalah laporan masyarakat akan terganggunya pencemaran lingkungan di sekitarnya berupa aktivitas industry, rumah tangga dan mitigasi bencana .

Pencapaian target indikator kinerja pertama hanya tercapai sebesar 100 % dari target 100% dengan tingkat capaian 100%. Dikarenakan tertangani dengan maksimal.

2. Indikator Kinerja Kedua :

Persentase sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan data base lingkungan dalam DPLHD yang tersedia seperti Dokumen Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daerah (DPLHD) Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Laporan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DPLHD) merupakan sarana publikasi informasi pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Tujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan validasi data serta ketajaman analisis sehingga laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimanfaatkan untuk evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan di daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipasi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.. Pencapaian Indikator ini masih belum tercapai sesuai harapan, dari target 70% dan pencapaian realisasi 70% dikarenakan belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengakses data base lingkungan dan SIL.

3. Indikator Kinerja Ketiga:

Persentase turunnya beban pencemaran pada ambien dan emisi yang terkendali untuk mengetahui indeks kualitas udara di kabupaten lampung barat terbilang belum ada pencemaran udara dari target 20% dan pencapaian realisasi 20 % sesuai dengan harapan.

4. Indikator Kinerja Keempat:

Persentase pengelolaan lingkungan sesuai kebijakan pemerintah daerah sebagai kabupaten konservasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat akan arti pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita dengan kegiatan penanaman pohon .

5. Indikator Kinerja Kelima:

Terkelolanya lahan kritis, perlindungan sumber-sumber mata air, terjaga nya daerah resapan air, terkelolanya keanekaragaman hayati berada di kecamatan Lumbok Seminung.



6. Indikator Kinerja ke enam
Terwujudnya pelayanan kebersihan di 1 kecamatan yaitu kecamatan balik bukit
Persentase penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup dimana untuk teknis pengumpulan dilaksanakan di bidang kebersihan pelayanan pengelolaan persampahan untuk saat ini 45 % dimana total sampah yang terangkut mencapai 32 m³/hari dari total timbunan sampah mencapai 70m³/hari
7. Indikator Kinerja Ketujuh
Tersedianya pemanfaatan tata ruang dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan yang terdapat di Hutan Kota dan Taman Kota Hamtebiu
8. Indikator Kinerja Ke Delapan
Tercapainya pemasangan lampu jalan, lampu hias serta tercapainya pemeliharaan lampu jalan dan lampu hias tersebar lampu penerangan jalan di beberapa titik di Kabupaten Lampung Barat

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Peningkatan Kinerja dibidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang dilaksanaka oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat terdapat peluang dan tantangan yaitu :

a. Tantangan

Dalam melaksanakan tujuan sebagai upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mencapai visi dan misi terdapat ancaman sesuai dengan identifikasinya sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat tantangan baik dari lingkungan internal maupun eksternal yaitu sebagai berikut :

Di lingkungan Internal yang menjadi tantangan yang terjadi umumnya adalah sebuah kelemahan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya system aplikasi Informasi Lingkungan Hidup
2. Perlunya Penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), analisis Laboratorium dan pegawai yang memiliki sertifikat AMDAL
3. Tuntutan Pelayanan Publik yang cepat, baik dan Profesional
4. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan Hidup di Daerah Yang Masih Harus Ditingkatkan
5. Belum Optimalnya Pelayanan Retribusi Persampahan dan sebagai PAD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Sedangkan lingkungan eksternal organisasi dalam pelaksanaan peningkatan Kinerja adalah :

1. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi
2. Tingkat Kesadaran dan Kepedulian seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder terkait dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang masih rendah
3. Komitmen penegakkan hukum belum optimal
4. Kurang nya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup

b. Peluang

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adanya Peluang yang dimiliki dalam mencapai tujuan sesuai dengan identifikasinya adalah sebagai berikut :

1. Isu Lingkungan merupakan isu global
2. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good environmental governance)
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya peralihan kewenangan urusan pemerintah sehingga urusan lingkungan hidup termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar. Konsekuensi dari ditetapkannya UU 23 tahun 2014 dan berikutnya dengan peraturan dan turunannya akan mentransformasi kewenangan Bappeda dari sebelumnya hanya menjalankan fungsi koordinasi, akan berubah menjadi fungsi eksekusi. Terkait dengan hal tersebut telah dilakukan pemetaan urusan lingkungan hidup di tingkat Kabupaten Lampung Barat karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat ada 3 (tiga) urusan yaitu Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bidang Kebersihan dan Bidang Pertamanan untuk mengembangkan organisasi pemerintah urusan lingkungan hidup yang akan direncanakan akan berbentuk Dinas Lingkungan Hidup tipe A
5. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan (staf)

c. Kekuatan

Yang menjadi Kekuatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan peningkatan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan, terutama dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Termasuk dalam poin ini adalah peraturan tentang AMDAL dan KLHS

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. Dokumen-dokumen strategis diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 dan yang terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang akan segera disusun;
4. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti Adiwiyata, Kalpataru, Adipura dan Keanekaragaman Hayati;
5. Perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk standarisasi meliputi pengujian, kompetensi personal, sistem manajemen lingkungan dan ekolabel;
6. Tingginya semangat dan komitmen kinerja tentang pelayanan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat
7. Inovasi Kegiatan berupa Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup
8. Terpenuhinya anggaran dana pada kegiatan-kegiatan prioritas Pengelolaan dan Pengendalian lingkungan hidup,kebersihan,pemasangan lampu jalan dan pertamanan

d. Kelemahan

Yang menjadi Kelemahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan Peningkatan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup
2. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja antara lain kelemahan dalam perencanaan kerja yang seyogyanya berbasis kepada hasil/outcome dan kurang tajamnya arah kegiatan dalam menyikapi berbagai persoalan lingkungan yang terjadi
3. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Masih terbatasnya SDM dari segi jumlah maupun dari segi kapasitas yang memahami permasalahan lingkungan hidup Kurangnya pemahaman terhadap perundang-undangan lingkungan hidup



5. Kurangnya ASN yang berkompeten di bidang Lingkungan Hidup
6. Pelayanan retribusi sampah yang belum maksimal
7. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional kerja antara lain pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pengelolaan persampahan, pertamanan dan penerangan.



BAB III PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis pembangunan Kabupaten Lampung Barat yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Good Governance* dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan *Good Governance* dan Pelayanan Prima dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (Pengetahuan dan Keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang Kebersihan , Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Seiring dengan perkembangan wilayah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan dinamika masyarakatnya, otomatis telah memunculkan permasalahan lingkungan diwilayah ini. Tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin besar dan dikawatirkan akan melewati daya dukungnya. Dengan berlakunya UU No. 23 tentang Pemerintah Daerah, maka pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Permasalahan lingkungan hidup pada saat ini semakin menunjukkan kualitas yang tidak bisa diabaikan. Issue Global Warning yang semakin memanas menjadikan persoalan lingkungan menjadi salah satu topik pembicaraan utama diberbagai kalangan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi terutama di kabupaten Lampung Barat menyebabkan meningkatnya permintaan akan ruang serta sumber daya alam yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Masalah lingkungan dan sumber daya alam menjadikan masalah Global khususnya yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam Kabupaten Lampung Barat yang sebagian besar wilayahnya berupa daratan tinggi dan memiliki daerah airan sungai terdapat Bahan Galian Golongan C, serta adanya permasalahan swasta yang mengelola sumber daya alam seperti pabrik Tempe dan Tahu di Kabupaten Lampung Barat Besar dimana lokasi produksi dan bahan baku alam sangat dekat dengan Kabupaten Lampung Barat. Dengan demikian limbah hasil pembuatan tersebut di buang ke sungai menjadi persoalan lingkungan yang perlu



menjadi perhatian. Ketergantungan ekonomi masyarakat kepada alam mengakibatkan degradasi lingkungan seperti adanya kegiatan penambangan liar, selain mengakibatkan erosi pengikisan tebing sungai juga terjadinya pencemaran air sungai sehingga terganggunya biota air. Orientasi masyarakat yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, pembuangan air limbah,berakibat sungai menjadi tercemar dan mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat. Berkaitan dengan sanitasi lingkungan seperti drainase,dan instalasi pembuangan air limbah pada umumnya masih diabaikan oleh masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan berjangkitnya penyakit lingkungan seperti diare, demam berdarah dan lainnya. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat itu sendiri.

Penggunaan Lahan beberapa tahun ini pemanfaatan lahan di Kabupaten Lampung Barat mengalami pertumbuhan yang cenderung statis atau tidak mengalami peningkatan yang tinggi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Barat wilayah administrasi Lampung Barat terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan hutan (non budidaya). Kawasan hutan meliputi luas pencapaian 126.956,27 Ha atau sekitar 59,25% dari luas administrasi atau sekitar 61,27% dariluas daratan, sedangkan sisanya sekitar 40,75% atau sekitar ± 87.318,28 Ha merupakan kawasan budidaya.

Tabel 2.4. Tutupan Lahan Daerah Kabupaten Lampung Barat

No.	Penutupan Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Hutan	51.257	24
2.	Kebun Campuran	118.186	55
3.	Ladang / Tegalan	13.729	6
4.	Permukiman	3.450	2
5.	Rawa	1.189	1
6.	Sawah	6.734	3
7.	Semak Belukar	12.659	6
8.	Tubuh Air	7.075	3
	Luas Indikatif Lambar	214.278	100

Sumber: Review RTRW Kabupaten Lampung Barat 2016-2036

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Lampung Barat. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yaitu :

1. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan
2. Masih Rendahnya Kesadaran dan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Ruang Terbuka dan Penerangan Jalan dan Pertamanan
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan Ruang Terbuka, Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan
5. Meningkatnya Konflik Manusia dan Satwa
6. Belum Optimalnya Pelestarian Keanekaragaman Hayati
7. Adanya Penurunan Kualitas dan Kuantitas dan Kualitas Air Bersih
8. Pengelolaan Lingkungan pada Industri Belum Optimal
9. Belum Optimalnya Sistem Informasi Lingkungan Hidup
10. Belum Optimalnya Pengendalian Pengendalian Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan (Konservasi) Sumber Daya Alam
11. Belum Optimalnya Rehabilitasi Lahan Kritis, Sumber Mata Air dan Muara Sungai
12. Belum Optimal Pengolahan Limbah/Limbah B3

13. Masih Rendahnya Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Tangga dan Industri Masih Rendah
14. Belum Optimal Pengendalian terhadap Efek Gas Rumah Kaca
15. Masih Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
16. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten Bidang Lingkungan Hidup.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Lampung

Berdasarkan telaahan yang telah dilakukan antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

- a. Terdapat sinkronisasi antara program dan kegiatan yang bersifat lintas Perangkat Daerah yang selalu terkoordinasi baik dalam manajemen Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dan berkontribusi sangat besar dalam pencapaian sasaran Renstra Propinsi.
- b. Tingkat pencapaian renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tidak jauh berbeda dengan pencapaian sasaran Renstra Provinsi Lampung karena sasaran akhirnya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH, Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada), Penataan Kota Liwa dan Kabupaten Konservasi .
- c. Terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaan Prasarana dan sarana Lingkungan Hidup yang menjadi penghambat tercapainya sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup karena kurang Operasional sarana dan prasarana yang memadai masih sangat bergantung pada Provinsi.
- d. Untuk kegiatan yang bersifat kewilayahan terdapat sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hanya sedikit terkendala kurangnya kebutuhan Prasarana dan sarana Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang kurang optimal.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis.

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administrative atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem suatu wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan social masyarakat diwilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup tidak lepas dari pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan dari isu strategis tersebut sasaran yang diharapkan salah satunya adalah meningkatnya pelayanan Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yaitu dengan rencana pengembangan sistem aplikasi pelayanan Pengelolaan Persampahan seta pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tertuang pada kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten ,Dokumen Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup Daerah (DPILHD) Kabupaten yang dilanjutkan yaitu Informasi Kajian Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD). Sehingga dengan tersedianya data informasi lingkungan hidup tersebut melalui sistem aplikasi yang bisa dan mudah diakses oleh pihak-pihak terkait supaya lingkungan hidup diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang baik di era globalisasi.

Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat adanya beberapa hal yang selama ini menjadi faktor penghambat Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat antara lain :

- a. Perlunya penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS, Pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), analisis laboratorium dan pegawai yang memiliki sertifikasi AMDAL.
- b. Perlunya Penambahan Prasarana dan Sarana dalam Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Pengelolaan Persampahan, dan Pertamanan



3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai permasalahan pembangunan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pertimbangan terhadap kajian sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung serta analisis terhadap RTRW dan KLHS kabupaten Lampung Barat, Beberapa isu strategis pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Lampung Barat dalam sebagai berikut adalah

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Persampahan
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan
3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan

Hasil dan Pembahasan Tahap Identifikasi dan perumusan Isu Strategis berdasarkan prioritas dengan pertimbangan unsur-unsur paling sedikit (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 pasal 9 ayat 1) yaitu

1. Karakteristik wilayah
2. Tingkat pentingnya potensi dampak
3. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan
4. Keterkaitan dengan materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program
5. Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
6. Hasil KLHS dari kebijakan, rencana, dan/atau program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.

Dalam RPJMN bidang lingkungan termasuk salah satu dari dalam 11 prioritas Nasional yaitu Lingkungan Hidup dan pengelolaan Bencana. Substansi Inti prioritas Lingkungan hidup dan pengelolaan Bencana adalah :

1. Perubahan Iklim (carbon track)
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan,
3. Sistem Peringatan Dini
4. Penanggulangan Bencana.

Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam, Pengembangan Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Arah Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup

1. Penataan dan peningkatan Pengelolaan Persampahan,
2. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)
3. Pembinaan dan Sosialisasi Intensif terhadap Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pemanfaatan dan pengendalian ruang.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ruang Terbuka, Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan
6. Membentuk Satuan Tugas Konflik Manusia dan Satwa
7. Memanfaatkan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Adat
8. Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagai Upaya Lampung Barat dalam Mendapatkan Insentif Hulu dan Hilir dan Pajak Karbon Melalui Perhitungan Nilai Ekonomi Karbon
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup
10. Pemberian Reward / Penghargaan Kepada Institusi/perorangan dalam Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup



Aternatif Kebijakan dan Arahan Mitigasi KLHS RTRW Kabupaten Lampung Barat		
Kebijakan RTRW	Masalah Pokok Lingkungan	Alternatif Kebijakan/Arahan Mitigasi
A. Struktur Ruang		
1) Sistem perkotaan	Pengelolaan Sampah, air bersih, sanitasi lingkungan, limbah domestik, konflik sosial antara pendatang dengan penduduk setempat.	<ul style="list-style-type: none"> • TPST • SPAM • Rekayasa Sosial • Ruang Terbuka Hijau • Sumur Resapan/Biopori • Memeperhatikan daya dukung wilayah
2) Sistem Jaringan Listrik	Khusus untuk PLTP, merubah bentang alam, mengganggu kawasan lindung, gangguan flora dan satwa liar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian lingkungan yang komprehensif • Pemantauan lingkungan yang intensif pada saat konstruksi • Bila menggunakan lahan kehutanan (Hutan Lindung), harus mencari lahan pengganti
3) Sistem Jaringan sumberdaya air	Konflik hulu-hilir, konflik sosial. Pencemaran air	Pendekatan Jasa Lingkungan Rekayasa Sosial
B. Pola Ruang		
4) Kawasan Pertanian dan Perkebunan	Pencemaran air, perubahan penggunaan lahan hutan menjadi lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan petani dalam penggunaan pupuk pestisida • Penggunaan pupuk organik • Pertanian Konservasi
C. Kebijakan RTRW		
5) Kawasan Pertambangan	Perubahan bentang alam, pencemaran air, pencemaran udara, perambahan kawasan hutan. Longsor, banjir, erosi dan sedimentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian organik • Kajian lingkungan yang komprehensif • Pemantauan lingkungan yang intensif pada saat konstruksi • Bila menggunakan lahan kehutanan (Hutan Lindung). Harus mencari lahan pengganti
6) Kawasan Industri	Perubahan bentang alam, pencemaran air, pencemaran udara, konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan lingkungan yang intensif pada saat konstruksi • Bila menggunakan lahan kehutanan (Hutan Lindung), harus mencari lahan pengganti
7) Kawasan Pariwisata	Perubahan bentang alam, terutama wisata alam, konflik sosial antara wisatawan dengan penduduk setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Rekayasa sosial, sosialisasi kegiatan wisata alam kepada masyarakat

Kesimpulan dari beberapa kajian diatas, maka untuk memantapkan RTRW Kabupaten Lampung Barat ada beberapa Rekomendasi sebagai berikut :

Kebijakan RTRW	Masalah Pokok Lingkungan	Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
A. Struktur Ruang			
1) Sistem perkotaan	Pengelolaan Sampah, air bersih, sanitasi lingkungan, limbah domestik, konflik sosial antara poendatang dengan penduduk setempat	<ul style="list-style-type: none"> TPST SPAM Rekayasa sosial Ruang Terbuka Hijau Sumur Respan /Biopori 	<ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan daya dukung wilayah
2) Sistem Jaringan Listrik	Khusus untuk PLTP, merubah bentang alam, mengganggu kawasan lindung, gangguan flora dan satwa liar	<ul style="list-style-type: none"> kajian lingkungan yang komprehensif Pemantauan lingkungan yang intensif pada saat kontruksi Bila menggunakan lahan kehutanan (Hutan Lindung), harus mencari lahan pengganti. 	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan pemantauan lingkungan yang intensif selama proses konstruksi Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang
3) Sistem jaringan sumberdaya air	Konflik hulu-hilir, konflik sosial, pencemaran air	<ul style="list-style-type: none"> Pendekatan Jasa Lingkungan Rekayasa Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Perda penggunaan air terpadu
B. Pola Ruang			
4) Kawasan Pertanian dan perkebunan	Pencemaran air, perubahan penggunaan lahan hutan menjadi lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengetahuan petani dalam penggunaan pupuk dan pestisida Penggunaan pupuk organik Pertanian kponservasi Pertanian organik 	<ul style="list-style-type: none"> Perda penggunaan pupuk dan pestisida Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang
5) Kawasan Pertambangan	Perubahan bentang alam, pencemaran air, pencemaran udara, perambahan kawasan hutan, longsor, banjir, erosi dan sedimentasi	<ul style="list-style-type: none"> Kajian lingkungan yang komprehensif Pemantauan lingkungan yang intensif saat Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan pemantauan lingkungan yang intensif selama proses konstruksi penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang
C. Kawasan RTRW			
6) Kawasan Industri	Perubahan bentang alam, pencemaran udara, konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> Pemanatauan lingkungan yang intensif pada saat konstruksi Bila menggunakan lahan kehutanan(Hutan Lindung) harus mencari lahan pengganti 	<ul style="list-style-type: none"> Kajian daya dukung sungai terhadap beban limbah Penggunaan IPAL
7) Kawasan Pariwisata	Perubahan bentang alam, terutama wisata alam, konflik sosial antara wisatawan dengan penduduk setempat	<ul style="list-style-type: none"> Rekayasa sosial, Sosialisasi kegiatan wisata alam kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat dilibatkan dalam mengembangkan wisata alam



4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

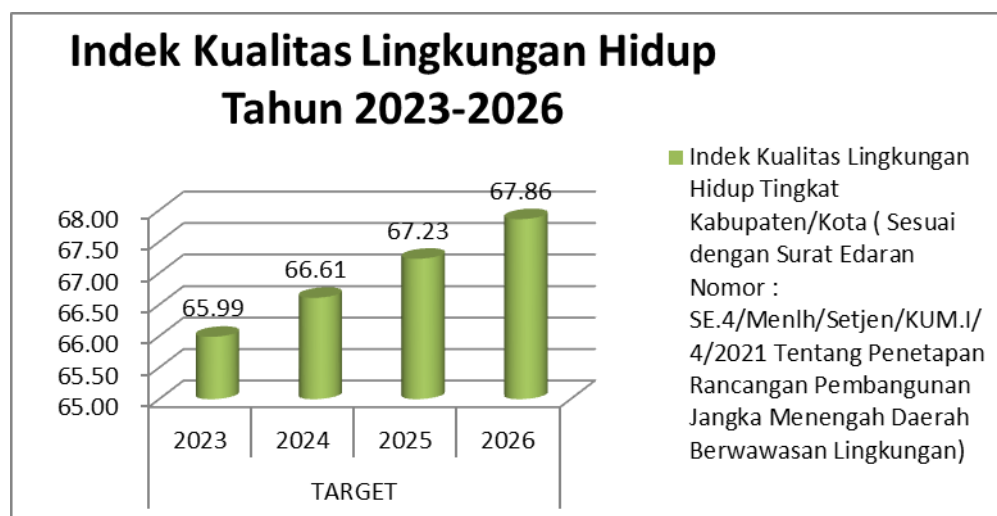
A. TUJUAN

Tujuan organisasi pada dasarnya jangka panjang, yang harus diselesaikan selama waktu itu, dan akan mengarahkan kinerja tahunan organisasi. Tujuan mencerminkan pernyataan kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau aktivitas. Untuk merealisasikan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program Perangkat Daerah secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karena tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (key performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah:

“Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup”

Dengan Indikator : “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)”
bersama Target 2023-2026



B. SASARAN

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil.

Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (action oriented) yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Attainable), nyata (Realistic) dan tepat waktu (Time Bound). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan diatas adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas Air dan Udara;**
- 2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca;**
- 3. Meningkatkan Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau;**
- 4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Persampahan.**

Sedangkan rencana target pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dengan prosentase target sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	58.54	58.64	58.74	58.84
			Indeks Kualitas Udara	84.04	84.14	84.24	84.34
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3	4	6	6
		Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	43.21	43.86	44.74	45.86
			Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	15	20	25	30
			Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	20 (120 Titik)	21.7 (130 Titik)	21.7 (130 Titik)	20 (120 Titik)
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	73	71	70	69
			Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	27	29	30	31

5.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Rencana Strategis.

Seluruh Indikator Kinerja yang terdapat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja periode 2023 – 2026.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-			
				2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Air (point)	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 + (C_i/L_{ij})^2}{2}}$ <p> L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j) IP_j : $(C_1/L_{1j}, C_2/L_{2j}, \dots)$ (C_i/L_{ij}) Maksimum : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij} (C_i/L_{ij}) Rata-rata : nilai rata-rata dari C_{ij}/L_{ij} </p>	58.54	58.64	58.74	58.84



		Indeks Kualitas Udara	$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{IKU} = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$	84.04	84.14	84.24	84.34
	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	$\text{Nilai Awal} - \text{Nilai Akhir} / \text{Nilai Awal} \times 100\%$	3	4	6	6
	Meningkatnyan Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	$\text{IKTL} = 100 - ((84,3 - (\text{TL} \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana, IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan</p> <p>TL dihitung dengan rumus: $\text{TL} = \frac{\text{LTL}}{\text{LW}}$</p>	43.21	43.86	44.74	45.86
		Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam	Proporsi Luasan RTH Terhadap Baku Luasan RTH yang harus ada = (Luas Ruang Terbuka Hijau(RTH) Milik Publik dan Privat / Luasan RTH yang harus ada) X100% Luas RTH yang harus ada Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008 yaitu 30% x Luas Wilayah Kecamatan Balik Bukit =64.372.Ha Wilayah Hutan 61,5% x 64,372 Ha = 39.588,78 Ha	15	20	25	30



		Masterplan	Wilayah Administrasi 38,5% x 64,372 Ha = 24.783,22 Ha Wilayah RTH 24.783 Ha x 60% = 14.869,93 Ha				
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	<p><i>Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi</i> = $(\sum \text{Titik Lampu yang ada saat ini} \times \text{Asumsi jarak ideal lampu jalan (50 Meter)}) / (\sum \text{Panjang Jalan yang layak PJU}) \times 100\%$</p> <p>Ket. Buku Standar Konstruksi Jaringan PLN (Jarang antara tiang listrik 50 meter) Jalan nasional = 109,49 KM Jalan Kabupaten = <u>685.30 KM</u> Jumlah = 7 94.79 KM /0.5 = 1.590 titik lampu jalan yang harus ada Jumlah titik lampu yang ada saat ini = 823 titik lampu Rencana titik lampu = 767 titik lampu (38 Titik Lampu pertahun)</p>	20 (120 Titik)	21.7 (130 Titik)	21.7 (130 Titik)	20 (120 Titik)
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	<p><i>Persentase Jumlah Sampah Tertangani</i> = $\frac{\text{Jumlah Sampah Tertangani}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah}} \times 100\%$</p>	73.00	71.00	70.00	69.00



		Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	$\text{Persentase Jumlah Sampah Tekurangi} = \frac{\text{Jumlah Sampah Tekurangi}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah}} \times 100\%$	27.00	29.00	30.00	31.00
--	--	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------



Strategis dan arahan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program.

4.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

Strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan Peningkatan Kinerja adalah :

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Persampahan
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan
3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 4 (Empat) Tahun ke depan adalah :

1. Penataan dan peningkatan Pengelolaan Persampahan
2. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)
3. Pembinaan dan Sosialisasi Intensif terhadap Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pemanfaatan dan pengendalian ruang.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ruang Terbuka, Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan
6. Membentuk Satuan Tugas Konflik Manusia dan Satwa
7. Memanfaatkan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Adat
8. Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagai Upaya Lampung Barat dalam Mendapatkan Insentif Hulu dan Hilir dan Pajak Karbon Melalui Perhitungan Nilai Ekonomi Karbon
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup
10. Pemberian Reward / Penghargaan Kepada Institusi/perorangan dalam Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

VISI RPJMD : Terwujudnya Lampung Barat Hebat dan Sejahtera				
MISI 1 RPJMD : Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan				
TUJUAN RPJMD : Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana				
SASARAN RPJMD : Meningkatkan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Air dan Udara Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. 	<ol style="list-style-type: none"> Penataan dan peningkatan Pengelolaan Persampahan Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Pembinaan dan Sosialisasi Intensif terhadap Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pemanfaatan dan pengendalian ruang. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ruang Terbuka, Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan Membentuk Satuan Tugas Konflik Manusia dan Satwa Memanfaatkan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Adat Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagai Upaya Lampung Barat dalam Mendapatkan Insentif Hulu dan Hilir dan Pajak Karbon Melalui Perhitungan Nilai Ekonomi Karbon Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup Pemberian Reward / Penghargaan Kepada Institusi/perorangan dalam Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya dijabarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan Kelompok Sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat untuk 5 (Lima) Tahun kedepan sebagaimana yang telah diamanatkan pada pasal 75 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah merupakan rangkaian Program dan Kegiatan yang berkesinambungan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Sebagai gambaran umum Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, telah direncanakan Program Indikatif sejumlah 8 (Delapan) Program yaitu program-program yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yaitu :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH, yang dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



5. Fasilitas Kunjanga Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Alat Besar
 3. Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor
 4. Pengadaan Mebel
 5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub.kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 4. Pemeliharaan Mebel
 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2). PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
 - a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 3. Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
 - 3). PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
 - a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sub.kegiatan :
 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui sub. Kegiatan :
 1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

- 4). PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
 1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 2. Pengelolaan Kebun Raya
 3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

- 5). PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
 - a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
 1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 2. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3.

- 6). PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 1. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

2. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 3. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
- 7). PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
 - b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
 1. Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
- 8). PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
 1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 3. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
- 9). PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakn melalui Sub.Kegiatan :
 1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10). PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
- a. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
 1. Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 2. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 3. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 4. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 6. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
 7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

- b. Kegiatan Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
1. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
 2. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
 3. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

Adapun yang dimaksud dengan Kegiatan adalah merupakan penjabaran dari program. Kegiatan memiliki jangka waktu tertentu yang relatif pendek di bandingkan dengan jangka waktu pelaksanaan suatu program. Adapun rencana kegiatan indikatif untuk proyeksi 4 (Empat) Tahun kedepan diuraikan kedalam tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif pada lampiran Renstra ini.

Tabel Detail Sub.Kegiatan Tahun 2023-2026

Kode				Program,Kegiatan dan sub Kegiatan	Detail Khusus SubKegiatan(Tahun)			
					2023	2024	2025	2026
1				2	3	4	5	6
2	11	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
2	11	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renstra, cascading, pohon kinerja, Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan, Penyusunan	Penyusunan Dokumen Renstra, cascading, pohon kinerja, Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan, Penyusunan	Penyusunan Dokumen Renstra, cascading, pohon kinerja, Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan, Penyusunan	Penyusunan Dokumen Renstra, cascading, pohon kinerja, Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan, Penyusunan



2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA-SKPD
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Rapat 12 Bulan 60 Orang	Pelaksanaan Rapat 12 Bulan 60 Orang	Pelaksanaan Rapat 12 Bulan 60 Orang	Pelaksanaan Rapat 12 Bulan 60 Orang
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji 35 Orang ASN	Pembayaran Gaji 35 Orang ASN	Pembayaran Gaji 35 Orang ASN	Pembayaran Gaji 35 Orang ASN
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pelaksanaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pelaksanaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pelaksanaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pelaksanaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 1 Orang	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 1 Orang	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 1 Orang	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 1 Orang
2	11	01	2.06		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah				
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 Paket
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 2 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 2 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 2 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 2 Paket
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sebanyak 2 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sebanyak 2 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sebanyak 2 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sebanyak 2 Paket
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 SKHU	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 SKHU	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 SKHU	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 SKHU
2	11	01	2.06	08	Fasilitas Kunjanga Tamu	Fasilitas Kunjanga Tamu sebanyak 12 Bulan	Fasilitas Kunjanga Tamu sebanyak 12 Bulan	Fasilitas Kunjanga Tamu sebanyak 12 Bulan	Fasilitas Kunjanga Tamu sebanyak 12 Bulan
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebanyak 12 Bulan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebanyak 12 Bulan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebanyak 12 Bulan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebanyak 12 Bulan
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak



						k 1 Unit	k 1 Unit	k 1 Unit	k 1 Unit
2	11	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Pengadaan Alat Besar sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Alat Besar sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Alat Besar sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Alat Besar sebanyak k 1 Unit
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Mebel sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Mebel sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Mebel sebanyak k 1 Unit
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak k 1 Unit
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 12 Bulan
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 Bulan
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak k 12 Bulan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak k 12 Bulan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak k 12 Bulan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak k 12 Bulan
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 Bulan
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama 12 Bulan
2	11	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel sebanyak k 1 Unit	Pemeliharaan Mebel sebanyak k 1 Unit	Pemeliharaan Mebel sebanyak k 1 Unit	Pemeliharaan Mebel sebanyak k 1 Unit
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak



2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	k 1 Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 2 Gedung	k 1 Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 2 Gedung	k 1 Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 2 Gedung	k 1 Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 2 Gedung
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang sebanyak 1 Dokumen
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD sebanyak 1 Dokumen
2	11	02	2.02	03	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen
2	11	03	2.01		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				



2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut selama 12 Bulan	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut selama 12 Bulan	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut selama 12 Bulan	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut selama 12 Bulan	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut selama 12 Bulan
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim selama 12 Bulan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim selama 12 Bulan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim selama 12 Bulan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim selama 12 Bulan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim selama 12 Bulan
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota selama 12 Bulan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota selama 12 Bulan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota selama 12 Bulan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota selama 12 Bulan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota selama 12 Bulan
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Peringatan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat selama 12 bulan	Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat selama 12 bulan	Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat selama 12 bulan	Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat selama 12 bulan	Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat selama 12 bulan
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman



						Hayati sebanya k 1 Dokume n	Hayati sebanya k 1 Dokume n	Hayati sebanya k 1 Dokume n	Hayati sebanya k 1 Dokume n
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Luasnya 8 Hektar	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Luasnya 8 Hektar	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Luasnya 8 Hektar	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Luasnya 8 Hektar
2	11	04	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Pengelolaan Kebun Raya Luasnya 42.26 Ha	Pengelolaan Kebun Raya Luasnya 43.26 Ha	Pengelolaan Kebun Raya Luasnya 44.26 Ha	Pengelolaan Kebun Raya Luasnya 45.26 Ha
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2.1 Ha seperti Belanja Mesin Potong Rumput 7 Unit, Pengecetan Taing Lampu, Pembangunan Pagar Hamtebiu 1 Paket, Pembuatan Taman Jalur Dua Pemda 1 Paket, Pembuatan Gapura Pemda Lampung Barat 1 paket, Pemasangan Bronjong bangunan Taman hamtebiu 130 m ²	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2.8 Ha	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 3.5 Ha	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 4.2 Ha
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya seluas 0 Ha	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya seluas 0 Ha	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya seluas 0 Ha	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya seluas 0 Ha
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam



						Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Orang	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Orang	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Orang	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Orang
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Unit	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Unit	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Unit	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Unit
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3				
2	11	05	2.01	01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 1 Dokumen	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 1 Dokumen	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 1 Dokumen	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 1 Dokumen
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 sebanyak 1 Dokumen	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 sebanyak 1 Dokumen	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 sebanyak 1 Dokumen	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 sebanyak 1 Dokumen
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Peningkatan, Pemanfaatan, Pengolahan,	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan



					dan/atau Penimbunan	Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan sebanyak 1 Dokumen	Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan sebanyak 1 Dokumen	Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan sebanyak 1 Dokumen	Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan sebanyak 1 Dokumen
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2	11	'06	2.01	01	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebanyak 1 Dokumen	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebanyak 1 Dokumen	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebanyak 1 Dokumen	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebanyak 1 Dokumen
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 20 orang	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 20 orang	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 20 orang	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 20 orang
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 20 Orang	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 20 Orang	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 20 Orang	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 20 Orang



2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH selama 12 Bulan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH selama 12 Bulan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH selama 12 Bulan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH selama 12 Bulan
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan



						Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen	Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen	Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen	Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 1 Lembaga	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 1 Lembaga	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 1 Lembaga	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 1 Lembaga
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan sebanyak 1 Dokumen
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat sebanyak 50 Orang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat sebanyak 50 Orang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat sebanyak 50 Orang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat sebanyak 50 Orang
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia



						Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja dalam rangka PPLH sebanyak 1 Entitas	Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja dalam rangka PPLH sebanyak 1 Entitas	Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja dalam rangka PPLH sebanyak 1 Entitas	Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja dalam rangka PPLH sebanyak 1 Entitas
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan sebanyak 1 Dokumen
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Peningkatan Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Peningkatan Ulang dan Pemanfaatan Kembali sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Peningkatan Ulang dan Pemanfaatan Kembali sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Peningkatan Ulang dan Pemanfaatan Kembali sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Peningkatan Ulang dan Pemanfaatan Kembali sebanyak 1 Laporan
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebanyak 45.473,62 Ton	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebanyak 45.746 Ton	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebanyak 46.007,22 Ton	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebanyak 46.467,29 Ton
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif



						dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebanyak 2 Kelompok	dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebanyak 2 Kelompok	dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebanyak 2 Kelompok	dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebanyak 2 Kelompok
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan seperti DID TPA Kubu Liku, Jasa Masterplan TPA Kubu Liku, Jasa UKL-UPL TPA Kubu Liku, Mobil Dump Truck Sampah sebanyak 3 Unit, Mobil Truck Tinja 1 Unit, Motor Bentor R3 15 Unit, Container 15 Unit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Sebanyak 1 Dokumen
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Persampahan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan



						sebanyak 1 Dokumen	sebanyak 1 Dokumen	sebanyak 1 Dokumen	sebanyak 1 Dokumen
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sebanyak 2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sebanyak 2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sebanyak 2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sebanyak 2 Unit
2	11	11	2.02		Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta				
2	11	11	2.02	01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi sebanyak 1Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi sebanyak 1Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi sebanyak 1Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi sebanyak 1Rekomendasi
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				
2	11	11	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah sebanyak 1 Laporan
2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lemb	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lemb	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lemb	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lemb



						aga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja sebanyak 1 Unit	aga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja sebanyak 1 Unit	aga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja sebanyak 1 Unit	aga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja sebanyak 1 Unit
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Laporan

5.2. Indikatif Kinerja

Indikator Kinerja adalah merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur sedangkan Sasaran Kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif dari indikator kinerja yang mencakup indikator Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Result/Outcomes*) dan Manfaat (*Benefit*) serta Dampak (*Impact*) dari suatu program atau kegiatan.

Adapun manfaat dari Indikator dan Sasaran Kinerja adalah :

- Memperjelas tentang informasi program dan kegiatan yang dilaksanakan;
- Menciptakan kesepakatan atau konsensus untuk menghindari kesalahan interpretasi dan perbedaan selama pelaksanaan program dan kegiatan;
- Membangun dasar bagi upaya pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan;

Indikator Kinerja terhadap berbagai Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang telah direncanakan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Lampung Barat Tahun 2023- 2026 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel Renstra ini.



5.3. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1. Kelompok Antorium Daur Ualng Sampah 3R (Reuse, Reduse, Recycle
2. ADIPURA
3. Kelompok Bank Sampah
4. Sekolah Adiwiyata
5. Desa Kalpatru
6. Ibu Rumah Tangga/Kelompok Dasa Wisma/Tim Pengerak PKK
7. Kelompok Tani
8. Aparatur Pemerintah/Aparatur Pekon
9. Masyarakat

5.4 Pendanaan Indikatif.

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan alat pengukur strategis.

Dana indikatif yang diperlukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun ke Lima Rencana Strategis

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Barat adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam rentang waktu 4 (Empat) Tahun (2023-2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Barat.

Salah satu tujuan di dalam RPJMD adalah terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat berupa Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan di Pemkab Lampung Barat dan mewujudkan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Akuntabel indikator kinerja tujuannya adalah sebagai berikut :



1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Penataan kota Liwa sebagai Kota Budaya
3. Kabupaten Konservasi

Adapun Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2023-2026 dapat diuraikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode
			(4)	(5)	(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.99	65.99	66.61	67.23	67.86	67.86

Dari tabel Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD diatas, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah yaitu

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	58.54	58.64	58.74	58.84
			Indeks Kualitas Udara	84.04	84.14	84.24	84.34
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3	4	6	6
		Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	43.21	43.86	44.74	45.86
Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	15		20	25	30		
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	20 (120 Titik)	21.7 (130 Titik)	21.7 (130 Titik)	20 (120 Titik)	



	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	73	71	70	69
		Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	27	29	30	31

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tata cara Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan jika semua komponen indeks (IKA,IKU,IKL dan IKAL) telah dihitung dan diketahui nilainya.

Komponen Indeks yang harus dihitung dan diketahui nilainya untuk perhitungan IKLH berdasarkan level wilayah yaitu :

- a. IKLH Nasional meliputi IKA,IKU,IKL dan IKAL
- b. IKLH Provinsi meliputi IKA,IKU,IKL dan IKAL; dan
- c. IKLH Kabupaten/Kota meliputi IKA,IKU dan IKL

Selanjutnya setelah semua komponen indeks telah dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH sesuai level wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH.

IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA,IKU,IKL dan IKAL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan :

IKLH Kabupaten/Kota : $(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$

IKLH Provinsi : $(0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$

IKLH Nasional : $(0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$

Perbandingan Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET			
			2023	2024	2025	2026
1	IKLH Kabupaten/Kota	Point	65.99	66.61	67.23	67.86
2	IKLH Provinsi	Point	73.94	74.56		
3	IKLH Nasional	Point				

Sumber : Surat Edaran 4/menlhk/Setjen/KUM.l/4/2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah daerah Berwawasan Lingkungan



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun 2023-2026 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis yang merupakan penajaman program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat untuk Tahun 2023-2026.

Selain itu, penyusunan Rencana Stretegis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Atas Kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

L i w a, 15 November 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Barat,



MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.MH.

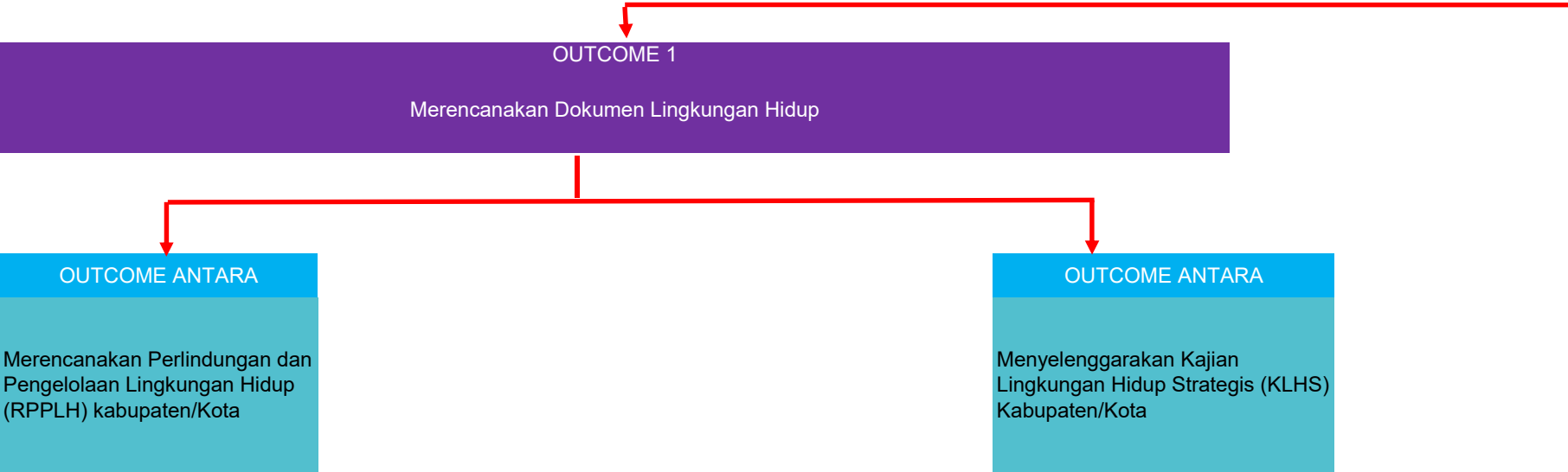
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730912 199903 1 005



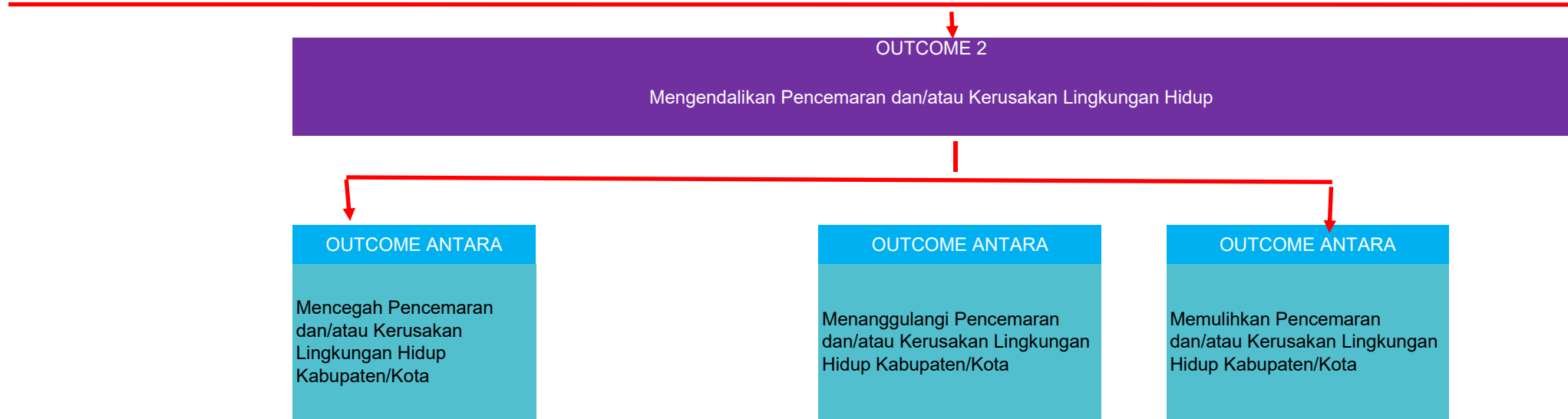
DATA ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023 - 2026

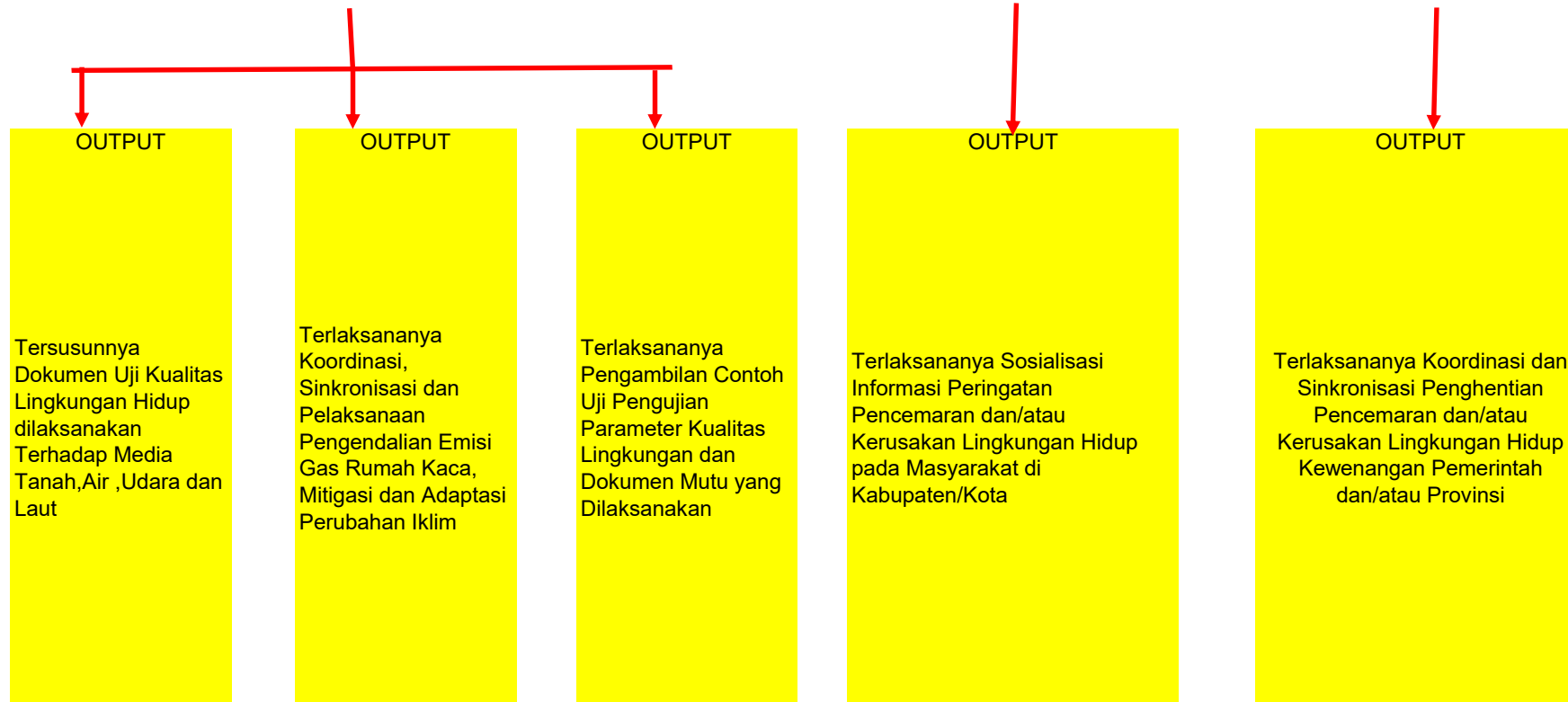
No	Bidang Urusan Pembangunan	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan
1	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Persampahan	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan	Penataan dan peningkatan Pengelolaan Persampahan
				Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)
			Masih Rendahnya Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pembinaan dan Sosialisasi Intensif terhadap Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan	Belum Optimalnya Pengelolaan Ruang Terbuka, Penerangan Jalan dan Pertamanan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pemanfaatan dan pengendalian ruang.
			Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Ruang Terbuka, Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ruang Terbuka, Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan
		Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Konflik Manusia dan Satwa	Membentuk Satuan Tugas Konflik Manusia dan Satwa
			Belum Optimalnya Pelestarian Keanekaragaman Hayati	
			Adanya penurunan kuantitas dan kualitas air bersih	
			Pengelolaan lingkungan pada industri belum optimalnya	
			Belum optimalnya sistem Informasi Lingkungan Hidup	
			Belum optimalnya pengendalian, pencemaran dan pelestarian lingkungan (konservasi) sumber daya alam	
			Belum Optimalnya rehabilitasi lahan kritis, sumber mata air dan muara sungai	
			Pengolahan limbah/limbah B3 belum optimal	
			Instalasi pengolahan limbah di rumah tangga dan industri masih rendah	
			Belum Optimalnya Pengendalian terhadap Efek Gas Rumah Kaca	Memanfaatkan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Adat
				Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagai Upaya Lampung Barat dalam Mendapatkan Insentif Hulu dan Hilir dan Pajak Karbon Melalui Perhitungan Nilai Ekonomi Karbon
			Masih Kurangnya Kapasitas Sumber daya Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup
Terbatasnya sumber daya manusia yang berkopeten di bidang lingkungan hidup				

			Pemberian Reward / Penghargaan Kepada Institusi/perorangan dalam Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup







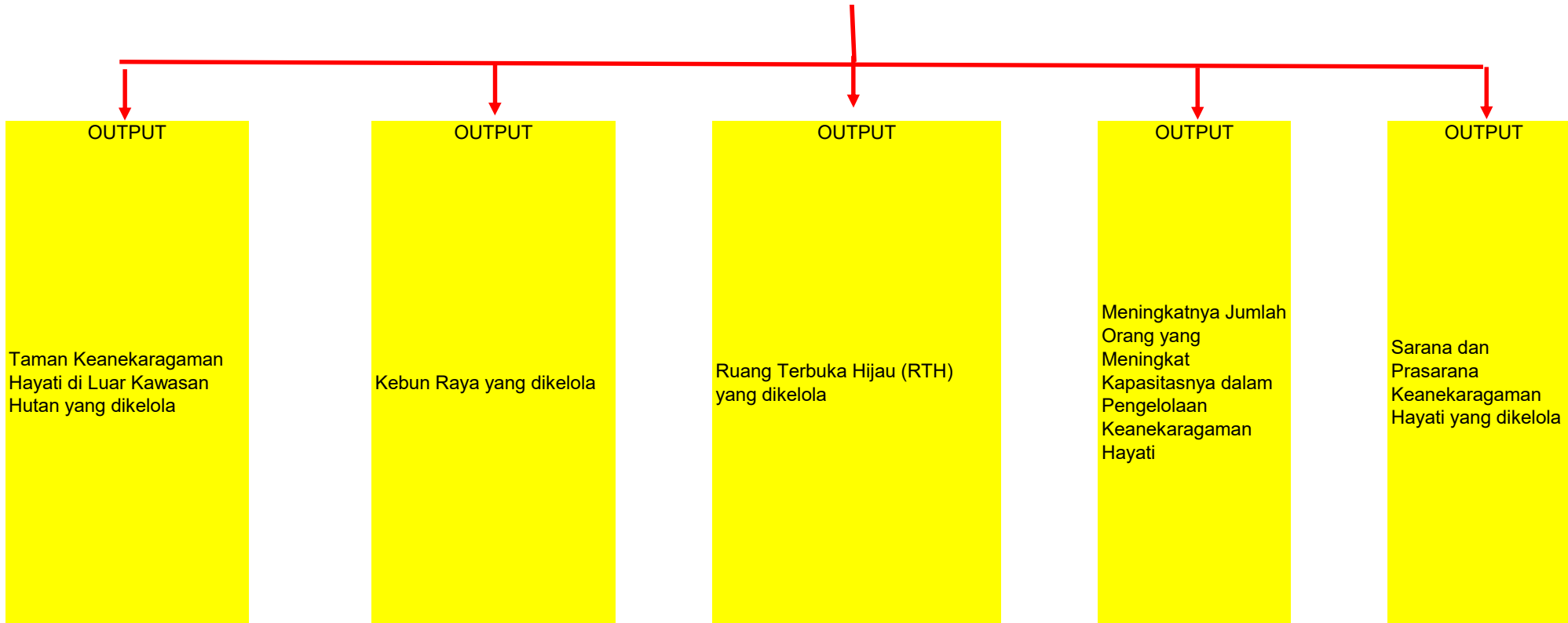


OUTCOME 3

Mengelola Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

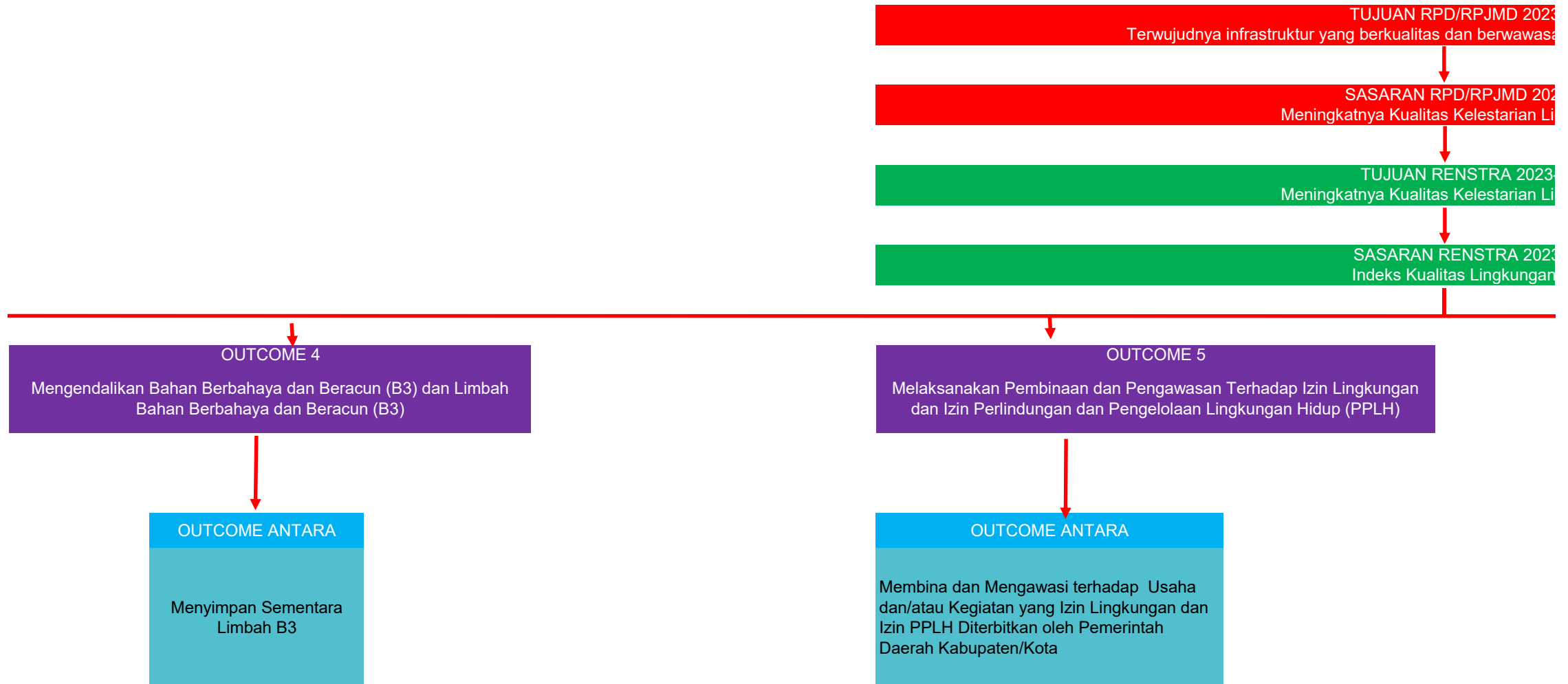
OUTCOME ANTARA

Mengelola Keanekaragaman
Hayati Kabupaten/Kota



LAMPIRAN I

LOGICAL FRAME WORK / POHC
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
TAHUN 2023-2026





INDIKATOR KINERJA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

2023-2026
Pengelolaan lingkungan serta tangguh bencana

2023-2026
Pengelolaan Lingkungan Hidup

2023-2026
Pengelolaan Lingkungan Hidup

2023-2026
Pengelolaan Lingkungan Hidup



OUTCOME 6
Melaksanakan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan HAK MHA yang Terkait Dengan PPLH

OUTCOME 7
Meningkatkan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

OUTCOME ANTARA
Melakukan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terbit dengan PPLH

OUTCOME ANTARA
Meningkatkan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

OUTCOME ANTARA
Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

OUTPUT

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

OUTPUT

Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan

OUTPUT

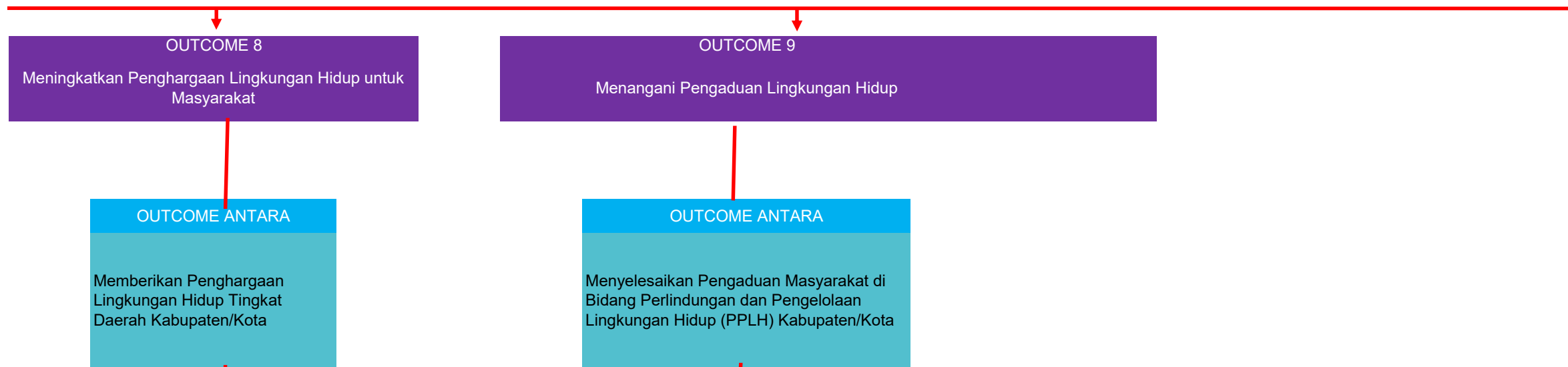
Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/ Institusi Skala Kabupaten/ Kota dan/ atau yang Terdaftar di Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan kompetensi SDMnya

OUTPUT

Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup

OUTPUT

Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota



OUTCOME 8

Meningkatkan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

OUTCOME ANTARA

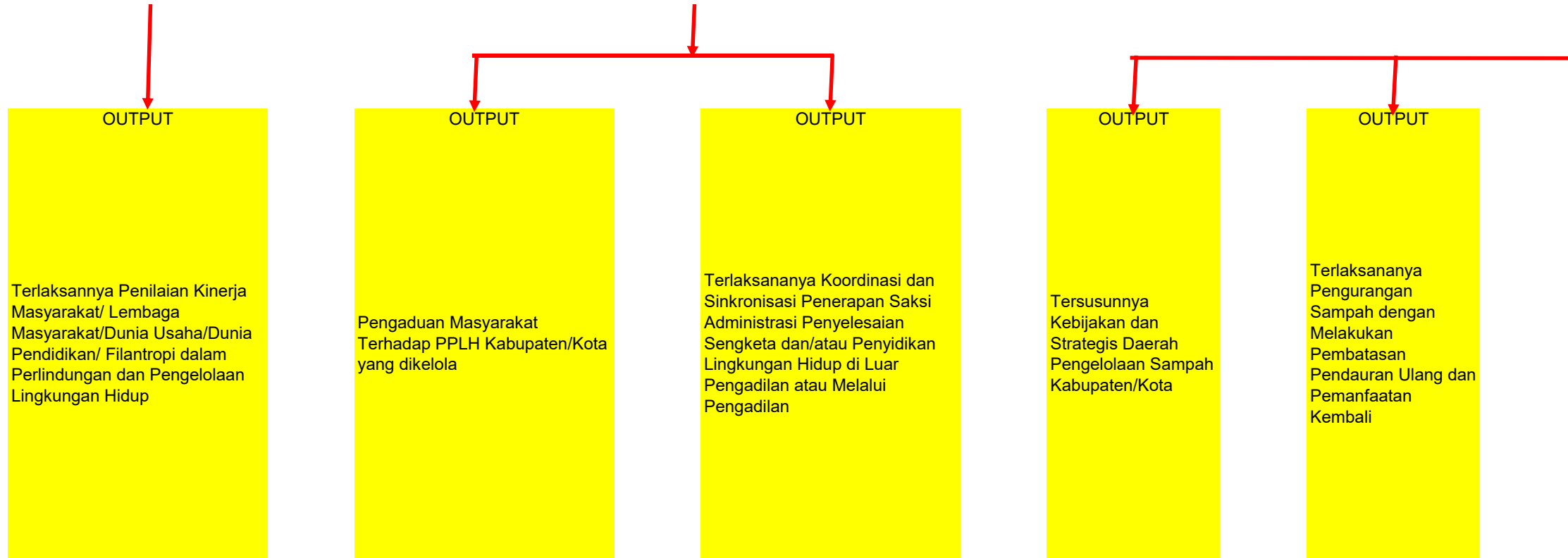
Memberikan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

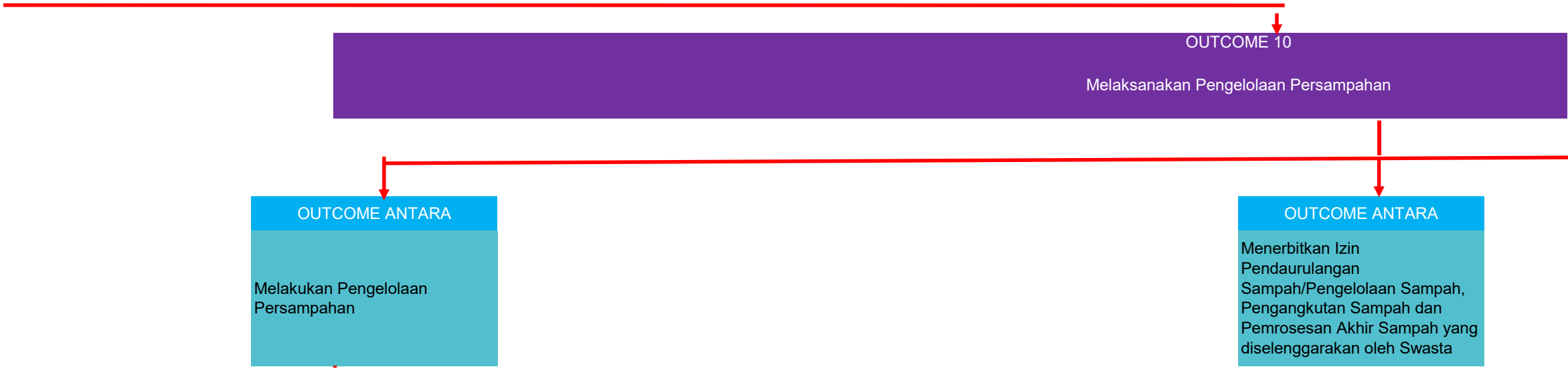
OUTCOME 9

Menangani Pengaduan Lingkungan Hidup

OUTCOME ANTARA

Menyelesaikan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

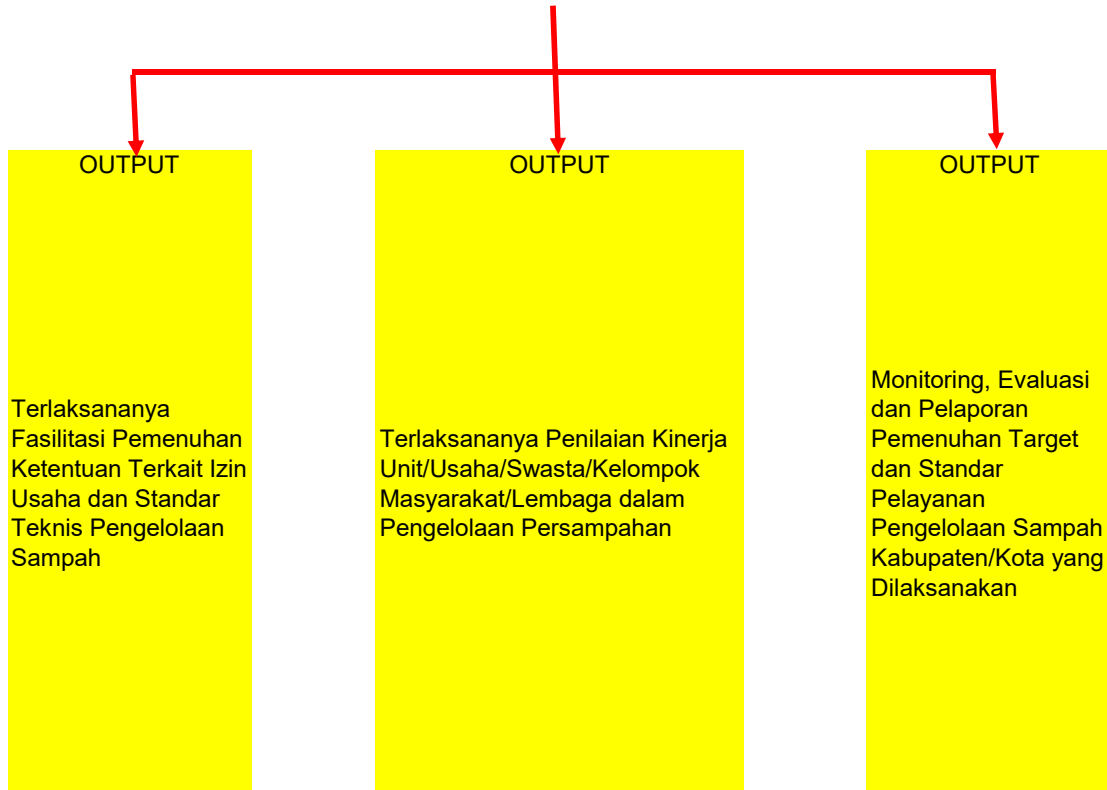




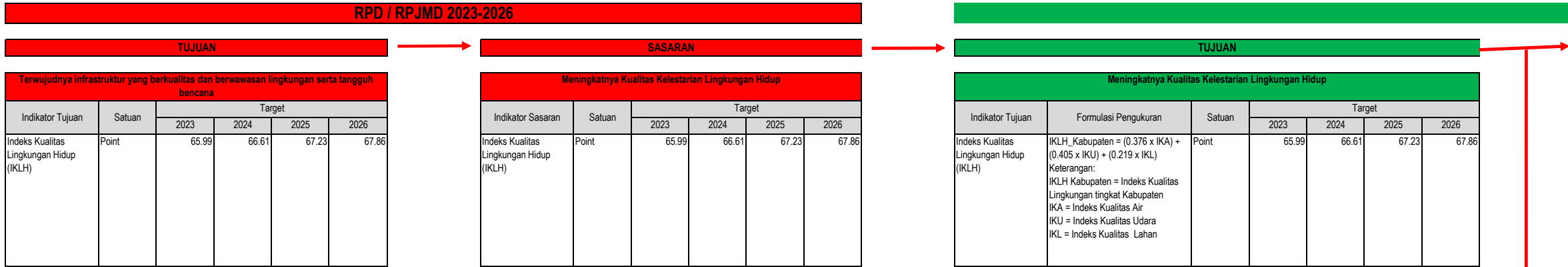




OUTCOME ANTARA
Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta



LAMPIRAN II



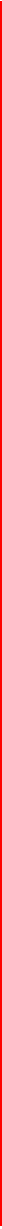


























**CASCADING DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026**

RENSTRA 2023-2026

SASARAN 1

Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP_j = \frac{[C/L_j] + (C/L_j)^2}{2}$ <p> L_j : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C_j : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j) $IP_{2..j}$: (C/L_{1j}, C₂/L_{2j}, ...) (C/L_{1j})Maksimum : Nilai maksimum dari C/L_{1j} (C/L_{1j})Rata-rata : nilai rata-rata dari C_{ij}/L_{1j} </p>	Point	58.54	58.64	58.74	58.84
Indeks Kualitas Udara (IKU)	$\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata-rata } NO_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata-rata } SO_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EV} - 0,1) \right)$ $I_{EV} = \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2}$	Point	84.04	84.14	84.24	84.34

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup		Persentase

SASARAN 2

Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca

Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Nilai Awal - Nilai Akhir / Nilai Awal x 100%	Persentase	3.00	4.00	6.00	6.00

















PROGRAM

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan
Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten	$\text{Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan LH} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang direncanakan}}{\text{Jumlah Dokumen yang tersusun}} \times 100 \%$	Persentase



PROGRAM

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	<p>INDIKATOR KUALITAS AIR SUNGAI</p> $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_i)^2 + (C_i/L_i)^2}{2}}$ <p><small>dimana: C_i = jika adalah nilai maksimum dari C_i/L_i L_i = jika adalah nilai maksimum dari C_i/L_i C_i = jika adalah nilai maksimum dari C_i/L_i L_i = jika adalah nilai maksimum dari C_i/L_i 1. Air bersih jika 0 < PI_j < 1,0 2. Bercemar ringan jika 1,0 < PI_j < 5,0 3. Bercemar sedang jika 5,0 < PI_j < 10,0 4. Bercemar berat jika PI_j > 10,0</small></p>	Point

	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$\text{Indeks Pencemaran Udara} = \frac{([IP] - ([NO]^{2+}) [IP] - ([SO]^{2-}))}{2}$	Point
--	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------

SASARAN 3

Meningkatnyan Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau						
Indikator Sasaran	Fomulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Indeks Kualitas Lahan / Vegetasi	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana, IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan</p> <p>TL dihitung dengan rumus: $TL = \frac{LTL}{LW}$</p>	Point	43.21	43.86	44.74	45.86
Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	Proporsi Luasan RTH Terhadap Baku Luasan RTH yang harus ada = (Luas Ruang Terbuka Hijau(RTH) Milik Publik dan Privat / Luasan RTH yang harus ada) X100% Luas RTH yang harus ada Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008 yaitu 30% x Luas Wilayah Kecamatan Balik Bukit =64.372,Ha Wilayah Hutan 61,5% x 64,372 Ha = 39.588,78 Ha Wilayah Administrasi 38,5% x 64,372 Ha = 24.783,22 Ha Wilayah RTH 24.783 Ha x 60% = 14.869,93 Ha	Persentase	15	20	25	30
Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	$\text{Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PUU kondisi layak fungsi} = \frac{\sum \text{Titik Lampu yang ada saat ini} \times \text{Asumsi jarak ideal lampu jalan (50 Meter)}}{\sum \text{Panjang Jalan yang layak PUU}} \times 100\%$ <p>Ket. Buku Standar Konstruksi Jaringan PLN (Jarang antara tiang listrik 50 meter)</p>	Persentase	20 (120 Titik)	21.7 (130 Titik)	21.7 (130 Titik)	20 (120 Titik)

PROGRAM

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Sasaran Program	Indikator Program	Fomulasi Pengukuran	Satuan
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - ((84,3 - (TL - DKK \times 100)) \times 50/54,3)$	Point

0.920810313

--	--	--	--	--	--	--	--



PROGRAM

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (L3)

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan
Terlaksananya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) = $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3}} \times 100 \%$	Persentase



PROGRAM

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pemegang Izin Lingkungan	$\text{Persentase Pemegang Izin Lingkungan yang diawasi} = (\text{Jumlah Izin yang dibina dan diawasi}) / (\text{Jumlah izin yang diterbitkan}) \times 100 \%$	Persentase




PROGRAM

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERK

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan
-----------------	-------------------	----------------------	--------

Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Persentase Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dikukuhkan = $\frac{\text{Jumlah Pengakuan MHA}}{\text{Jumlah Masyarakat Hukum Adat}} \times 100\%$	Persentase
--------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------



PROGRAM			
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan
Terlaksananya Edukasi dan Komunikasi di Bidang Lingkungan	Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup = $\frac{\text{Jumlah Peserta Pelatihan}}{\text{Jumlah Peserta Pelatihan yang tersedia}} \times 100\%$	Persentase



PROGRAM

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan
Tersedianya Penghargaan untuk Masyarakat yang Peduli Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan	$\text{Persentase Sekolah Yang Mendapat Penghargaan} = \frac{(\text{Jumlah Sekolah yang mendapat penghargaan})}{(\text{Jumlah Sekolah Yang Dibina})} \times 100 \%$	Persentase

SASARAN 4

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan						
Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Persentase Jumlah Sampah Tertangani	$Persentase\ Jumlah\ Sampah\ Tertangani = \frac{Jumlah\ Sampah\ Tertangani}{Jumlah\ Timbunan\ Sampah} \times 100\%$	Persentase	73.00	71.00	70.00	69.00
Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	$Persentase\ Jumlah\ Sampah\ Tekurangi = \frac{Jumlah\ Sampah\ Tekurangi}{Jumlah\ Timbunan\ Sampah} \times 100\%$	Persentase	27.00	29.00	30.00	31.00

PROGRAM

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun	Jumlah Sampah Yang <i>Terkelola</i> = Jumlah Sampah yang Tertangani + Jumlah Sampah yang Tekurangi	Ton/Tahun



KEGIATAN



Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target			
2023	2024	2025	2026
81.96	81.97	81.98	81.99

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Banyaknya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	28	28	28	28







KEGIATAN

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Banyaknya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	4	4	4	4

KEGIATAN

administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Tersusunnya dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Banyaknya dokumenBarang Milik Daerah Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1

KEGIATAN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1



KEGIATAN

Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	Banyaknya paket penyediaan administrasi umum	paket	8	8	8	8

KEGIATAN

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya pengadaan barang miik daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Banyaknya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Unit	7	7	7	7



KEGIATAN

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	banyaknya sekretariat dan bidang	sub organisasi	6	6	6	6



KEGIATAN

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Banyaknya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	20	20	20	20

--	--	--	--

Target			
2023	2024	2025	2026
100	100	100	100

KEGIATAN

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH kabupaten/Kota yang disusun		Dokumen	1	1	0	0



KEGIATAN

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Dokumen	3	3	2	2

Target

Target			
2023	2024	2025	2026
58.54	58.64	58.74	58.84



KEGIATAN

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Dokumen	1	1	1	1

84.04	84.14	84.24	84.34
-------	-------	-------	-------

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang		Dokumen	1	1	1	1
Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		Dokumen	1	1	1	1



KEGIATAN

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026

Tersedianya informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		Laporan	1	1	1	1
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------	---	---	---	---

Target			
2023	2024	2025	2026
45.38	47.86	50.34	52.82

KEGIATAN							
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		Ha	8.00	8.00	8.00	8.00
Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		Ha	42.26	43.26	43.26	45.26
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Dikelola	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		Ha	2.10	2.80	2.80	4.20
Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati		Orang	1	1	1	1
Sarana dan Prasarana Keaneekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola		Unit	1	1	1	1



KEGIATAN

INDUKSI (LIMBAH B3)

Penyimpanan Sementara Limbah B3

Target			
2023	2024	2025	2026
20	25	30	35

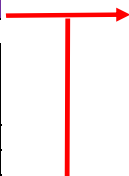
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Dokumen	1	1	1	1

Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		Laporan	1	1	1	1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------	---	---	---	---

LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
Target				
2023	2024	2025	2026	
80	80	80	80	

KEGIATAN							
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		Orang	20	20	20	20
Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Laporan	20	20	20	20
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Dokumen	1	1	1	1

[Purple Box]				
[Purple Box]				
Target				
2023	2024	2025	2026	



KEGIATAN									
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran				Satuan	Target		
						2023	2024	2025	2026

1	1	2	2
---	---	---	---

Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		Dokumen	0	0	1	1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------	---	---	---	---

KEGIATAN

Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Kelembagaan MHA Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan		Dokumen	1	0	1	1

AKAT

Target				
2023	2024	2025	2026	
100	100	100	100	

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		Lembaga	1	1	1	1

Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		Dokumen	1	1	1	1
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		Orang	50	50	50	50

Target			
2023	2024	2025	2026
10	10	10	10



KEGIATAN							
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		Entitas	1	1	1	1



Target			
2023	2024	2025	2026
45,473.62	45.746	46,007.22	46,467.29

KEGIATAN

Pengelolaan Sampah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		Dokumen	1	1	1	1
Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Laporan	1	1	1	1
Telaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Ton	45.473,62	45.746	46.007,22	46.467,29
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		Kelompok	2	2	2	2
Telaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah		Dokumen	1	1	1	1
Telaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		Dokumen	1	1	1	1

Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		Unit	2	2	2	2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	---	---	---	---



KEGIATAN

Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026

Diterbitkannya Rekomendasi Atas Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi		Rekomendasi	1	1	1	1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------	---	---	---	---

KEGIATAN

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah		Laporan	1	1	1	1
Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja		Unit	1	1	1	1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Laporan	1	1	1	1



SUBKEGIATAN

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	11	11

44

SUBKEGIATAN

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

--	--	--	--	--	--	--

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	2	2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	---	---	---

SUBKEGIATAN						
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	12	12	12

SUBKEGIATAN						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	36	36	36	36

SUBKEGIATAN						
Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1

SUBKEGIATAN						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	18	18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	----	----	----

SUBKEGIATAN

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026

Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	2	2

SUBKEGIATAN

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12

SUBKEGIATAN

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	2

SUBKEGIATAN

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	4	4
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------	---	---	---	---

SUBKEGIATAN

Fasilitas Kunjangan Tamu						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitas Kunjangan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjangan Tamu	Laporan	12	12	12	12

SUBKEGIATAN

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	20	20	20

SUBKEGIATAN

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pengadaan Alat Besar						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkut Darat Tak Bermotor yang disediakan	Unit	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pengadaan Mebel						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12

SUBKEGIATAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			

Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	2023	2024	2025	2026
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	109	109	109	109

SUBKEGIATAN

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12

SUBKEGIATAN

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	20	20

SUBKEGIATAN

Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah Alat Besar yang Terpelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkut	Unit	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pemeliharaan Mebel						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2	2	2

SUBKEGIATAN

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2

SUBKEGIATAN

Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	1	1	0	0

SUBKEGIATAN

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Yang disusun	Dokumen	1	1	1	1

KLHS RPJP

SUBKEGIATAN

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	1	0	0

KLHS RPJMD

SUBKEGIATAN

Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersusunnya KLHS untuk KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026

Tersedianya informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	1	1	1
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	---	---	---

SUBKEGIATAN

Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	8	8	8	8

SUBKEGIATAN

Pengelolaan Kebun Raya						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	42.26	43.26	44.26	45.26

SUBKEGIATAN

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Dikelola	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	11.00	11.00	11.00	11.00
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

SUBKEGIATAN

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Orang	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Orang	20	20	20	20

SUBKEGIATAN

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	20	20	20	20

SUBKEGIATAN

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026

Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen	0	0	1	1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	---	---	---

SUBKEGIATAN

Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Kelembagaan MHA Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	1	0	1	1

SUBKEGIATAN

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	50	50	50	50

SUBKEGIATAN

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			
			Target

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	2023	2024	2025	2026
Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Telaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	45,473.62	45.746	46,007.22	46,467.29

SUBKEGIATAN

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target				
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	2	2	2	2	2

SUBKEGIATAN

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	2	2	2	2

SUBKEGIATAN

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026

Diterbitkannya Rekomendasi Atas Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi	1	1	1	1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---	---	---	---

SUBKEGIATAN

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah						
Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	1	1	1	1

SUBKEGIATAN

Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

Sasaran SubKegiatan	Indikator SubKegiatan	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3					4	5	6	7	8		9		10		11		12		13	14
Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Bidang Urusan Yang Dilaksanakan	81,94%*	81,94%*	81,96%	12,469,692,850	81,97%	13,093,177,493	81,98%	13,747,836,367	81,99%	14,655,728,185	81,99%	53,966,434,895	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	76 Dokumen	76 Dokumen	28 Dokumen	66,581,000	25 Dokumen	69,910,050	28 Dokumen	73,405,553	28 Dokumen	77,075,830	100%	286,972,433	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	40 Dokumen	11 Dokumen	25,939,000	11 Dokumen	27,235,950	11 Dokumen	28,597,748	11 Dokumen	30,027,635	44 Dokumen	111,800,332	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	4,725,000	1 Dokumen	4,961,250	1 Dokumen	5,209,313	4 Dokumen	19,395,563	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,200,000	1 Dokumen	4,410,000	1 Dokumen	4,630,500	4 Dokumen	17,240,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,200,000	1 Dokumen	4,410,000	1 Dokumen	4,630,500	4 Dokumen	17,240,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,200,000	1 Dokumen	4,410,000	1 Dokumen	4,630,500	4 Dokumen	17,240,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	4,000,000	2 Laporan	4,200,000	2 Laporan	4,410,000	2 Laporan	4,630,500	8 Laporan	17,240,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	20,142,000	12 Laporan	21,149,100	12 Laporan	22,206,555	12 Laporan	23,316,883	48 Laporan	86,814,538	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku

		2	11	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3,206,403,200	4 Dokumen	3,366,723,360	4 Dokumen	3,535,059,528	4 Dokumen	3,711,812,504	4 Dokumen	13,819,998,592	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	35 orang	36 orang	3,196,553,200	36 orang	3,356,380,860	36 orang	3,524,199,903	36 orang	3,700,409,898	36 orang	13,777,543,861	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1Laporan	3,500,000	2 Laporan	3,675,000	2 Laporan	3,858,750	2 Laporan	4,051,688	8 Laporan	15,085,438	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	18 Laporan	3,350,000	18 Laporan	3,517,500	18 Laporan	3,693,375	18 Laporan	3,878,044	72 Laporan	14,438,919	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,150,000	1 Dokumen	3,307,500	1 Dokumen	3,472,875	4 Dokumen	12,930,375	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.03		Kegiatan administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	13,081,800	1 Dokumen	13,735,890	1 Dokumen	14,422,685	1 Dokumen	15,143,819	4 Dokumen	56,384,193	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	13,081,800	1 Dokumen	13,735,890	1 Dokumen	14,422,685	1 Dokumen	15,143,819	4 Dokumen	56,384,193	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	190,334,000	1 Dokumen	199,850,700	1 Dokumen	209,843,235	1 Dokumen	220,335,397	1 Dokumen	820,363,332	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	1 paket	150,000,000	1 paket	157,500,000	1 paket	165,375,000	1paket	173,643,750	4 Paket	646,518,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
			11	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	20,834,000	4 Dokumen	21,875,700	4 Dokumen	22,969,485	1 Dokumen	24,117,959	16 Dokumen	89,797,144	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	2 orang	19,500,000	2 orang	20,475,000	2 orang	21,498,750	2 orang	22,573,688	8 orang	84,047,438	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	8 Paket	8 Paket	8 Paket	337,627,600	8 Paket	354,508,980	8 Paket	372,234,429	8 Paket	390,846,150	8 Paket	1,455,217,159	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	12 Paket	2,773,600	12 Paket	2,912,280	12 Paket	3,057,894	12 Paket	3,210,789	48 Paket	11,954,563	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1 Paket	25,100,000	1 Paket	26,355,000	1 Paket	27,672,750	1 Paket	29,056,388	4 Paket	108,184,138	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2 Paket	66,020,000	2 Paket	69,321,000	2 Paket	72,787,050	2 Paket	76,426,403	8 Paket	284,554,453	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku

2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	7,860,000	6 Dokumen	8,253,000	6 Dokumen	8,665,650	6 Dokumen	9,098,933	24 Dokumen	33,877,583	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5,848,000	12 Laporan	6,140,400	12 Laporan	6,447,420	12 Laporan	6,769,791	48 Laporan	25,205,611	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	230,026,000	12 Laporan	241,527,300	12 Laporan	253,603,665	12 Laporan	266,283,848	60 Laporan	991,440,813	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	7 unit	7 unit	7 unit	3,924,561,000	7 unit	4,120,789,050	7 unit	4,326,828,503	7 unit	4,763,669,928	28 unit	17,135,848,480	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	700,000,000	1 Unit	735,000,000	1 Unit	771,750,000	1 Unit	810,337,500	4 Unit	3,017,087,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,050,000,000	1 Unit	1,102,500,000	1 Unit	1,267,875,000	4 Unit	4,420,375,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07	4	Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkut Darat Tak Bermotor yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,050,000,000	1 Unit	1,102,500,000	1 Unit	1,267,875,000	4 Unit	4,420,375,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	3 Unit	24,561,000	1 Unit	25,789,050	1 Unit	27,078,503	1 Unit	28,432,428	7Unit	105,860,980	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	200,000,000	1 Unit	210,000,000	1 Unit	220,500,000	1 Unit	231,525,000	4 Unit	862,025,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	500,000,000	1 Unit	525,000,000	1 Unit	551,250,000	1 Unit	578,812,500	4 Unit	2,155,062,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	500,000,000	1 Unit	525,000,000	1 Unit	551,250,000	1 Unit	578,812,500	4 Unit	2,155,062,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Sub Organisasi	6 Sub Organisasi	6 Sub Organisasi	3,644,082,050	6 Sub Organisasi	3,826,286,153	6 Sub Organisasi	4,017,600,460	6 Sub Organisasi	4,218,480,483	6 Sub Organisasi	15,706,449,146	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	3,150,000	12 Laporan	3,307,500	12 Laporan	3,472,875	48 Laporan	12,930,375	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	84 Laporan	3,461,300,000	84 Laporan	3,634,365,000	84 Laporan	3,816,083,250	84 Laporan	4,006,887,413	336 Laporan	14,918,635,663	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	52,500,000	1 Laporan	55,125,000	1 Laporan	57,881,250	4 Laporan	215,506,250	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	129,782,050	12 Laporan	136,271,153	12 Laporan	143,084,710	12 Laporan	150,238,946	48 Laporan	559,376,858	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku

		2	11	1	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	25 Unit	25 Unit	20 Unit	1,100,104,000	19 Unit	1,155,109,200	19 Unit	1,212,864,660	19 Unit	1,273,507,893	19 Unit	4,741,585,753	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	
		2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	25 Unit	300,000,000	25 Unit	315,000,000	25 Unit	330,750,000	25 Unit	347,287,500	19 Unit	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah Alat Besar yang Terpelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	1 Unit	250,000,000	1 Unit	262,500,000	1 Unit	275,625,000	1 Unit	289,406,250	4 Unit	1,077,531,250	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkut	0 Unit	0 Unit	1 Unit	250,000,000	1 Unit	262,500,000	1 Unit	275,625,000	1 Unit	289,406,250	4 Unit	1,077,531,250	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	200,000,000	1 Unit	210,000,000	1 Unit	220,500,000	1 Unit	231,525,000	4 Unit	862,025,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	3 Unit	12,434,000	2 Unit	13,055,700	2 Unit	13,708,485	2 Unit	14,393,909	8 Unit	53,592,094	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	87,670,000	2 Gedung	92,053,500	2 Gedung	96,656,175	2 Gedung	101,488,984	2 Gedung	377,868,659	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Persusunannya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten	100%	100%	100%	2,350,000,000	100%	2,022,500,000	100%	1,102,500,000	100%	1,157,625,000	100%	6,632,625,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	2	2.01		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Akademi dan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	472,500,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	922,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	472,500,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	922,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	2	2:02		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1,900,000,000	3 Dokumen	1,550,000,000	2 Dokumen	1,102,500,000	2 Dokumen	1,157,625,000	9 Dokumen	5,710,125,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	2	2:02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	525,000,000	1 Dokumen	551,250,000	1 Dokumen	578,812,500	4 Dokumen	2,155,062,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	2	2:02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	900,000,000	1 Dokumen	500,000,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	1,400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat

		2	11	2	2:02	3	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	525,000,000	1 Dokumen	551,250,000	1 Dokumen	578,812,500	4 Dokumen	2,155,062,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca		2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	60.00 Point	60.00 Point	58.54 Point	1,480,000,000	58.64 Point	1,554,000,000	58.74 Point	1,631,700,000	58.84 Point	1,713,285,000	58.84 Point	6,378,985,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
								Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.73 Point	84.73 Point	84.04 Point		84.14 Point		84.24 Point		84.34 Point		84.34 Point		Dinas Lingkungan Hidup	
		2	11	3	2.01			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,180,000,000	1 Dokumen	1,239,000,000	1 Dokumen	1,300,950,000	1 Dokumen	1,365,997,500	4 Dokumen	5,085,947,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen					
							Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen					
		2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	315,000,000	1 Dokumen	330,750,000	1 Dokumen	347,287,500	4 Dokumen	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	420,000,000	1 Dokumen	441,000,000	1 Dokumen	463,050,000	4 Dokumen	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
							Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	480,000,000	1 Dokumen	504,000,000	1 Dokumen	529,200,000	1 Dokumen	555,660,000	4 Dokumen	2,068,860,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	3	2.02		Kegiatan Pengulangan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	315,000,000	1 Laporan	330,750,000	1 Laporan	347,287,500	4 Laporan	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat

		2	11	3	2.02	1	Pemberian Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	315,000,000	1 Laporan	330,750,000	1 Laporan	347,287,500	4 Laporan	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	41.63 Point	41.63 Point	45.38 Point	13,800,000,000	47.86 Point	14,490,000,000	50.34 Point	15,214,500,000	52.82 Point	15,975,225,000	52.82 Point	59,479,725,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	4	2.01			Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Ha	8 Ha	8 Ha		8 Ha		8 Ha		8 Ha		8 Ha			
								Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	42.26 Ha	42.26 Ha	42.26 Ha		43.26 Ha		44.26 Ha		45.26 Ha		45.26 Ha			
							Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.1 Ha	2.1 Ha	2.1 Ha	13,800,000,000	2.8 Ha	14,490,000,000	3.53 Ha	15,214,500,000	4.2 Ha	15,975,225,000	4.2 Ha	59,479,725,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
								Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	0 Orang	0 Orang	1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang			
								Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	0 Unit	0 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit			
		2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Ha	8 Ha	8 Ha	750,000,000	8 Ha	787,500,000	8 Ha	826,875,000	8 Ha	868,218,750	8 Ha	3,232,593,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	4	2.01	3	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	42.26 Ha	42.26 Ha	42.26 Ha	2,000,000,000	43.26 Ha	2,100,000,000	44.26 Ha	2,205,000,000	45.26 Ha	2,315,250,000	45.26 Ha	8,620,250,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.1 Ha	2.1 Ha	2.1 Ha	10,000,000,000	2.8 Ha	10,500,000,000	3.53 Ha	11,025,000,000	4.2 Ha	11,576,250,000	4.2 Ha	43,101,250,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	4	2.01	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	0 Orang	0 Orang	1 Orang	300,000,000	1 Orang	315,000,000	1 Orang	330,750,000	1 Orang	347,287,500	4 Orang	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	4	2.01	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	0 Unit	0 Unit	1 Unit	750,000,000	1 Unit	787,500,000	1 Unit	826,875,000	1 Unit	868,218,750	1 Unit	3,232,593,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	20%	20%	20%	400,000,000	25%	420,000,000	30%	441,000,000	35%	463,050,000	35%	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat

		2	11	5	2.01		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	420,000,000	1 Dokumen	441,000,000	1 Dokumen	463,050,000	4 Dokumen	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
								Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				4 Laporan			
		2	11	5	2.01	1	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	210,000,000	1 Dokumen	220,500,000	1 Dokumen	231,525,000	1 Dokumen	862,025,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	5	2.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	210,000,000	1 Laporan	220,500,000	1 Laporan	231,525,000	4 Laporan	862,025,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pemegang Izin Lingkungan	80%	80%	80%	950,000,000	80%	997,500,000	80%	1,047,375,000	80%	1,099,743,750	80%	4,094,618,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	6	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Sarat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0 Orang	0 Orang	20 Orang		20 Orang	20 Orang	20 Orang				80 Orang			

						dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	20 Laporan	950,000,000	20 Laporan	997,500,000	20 Laporan	1,047,375,000	20 Laporan	1,099,743,750	40 Laporan	4,094,618,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen			
		2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	315,000,000	1 Dokumen	330,750,000	1 Dokumen	347,287,500	4 Dokumen	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	6	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup	0 Orang	0 Orang	20 Orang	100,000,000	20 Orang	105,000,000	20 Orang	110,250,000	20 Orang	115,762,500	80 Orang	431,012,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	20 Laporan	300,000,000	20 Laporan	315,000,000	20 Laporan	330,750,000	20 Laporan	347,287,500	80 Laporan	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	6	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	262,500,000	1 Dokumen	275,625,000	1 Dokumen	289,406,250	4 Dokumen	1,077,531,250	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0%	0%	1%	400,000,000	1%	420,000,000	2%	741,000,000	2%	778,050,000	2%	2,339,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	7	2.01		Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	315,000,000	2 Dokumen	615,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat

		2	11	7	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	300,000,000	1	315,000,000	2 Dokumen	615,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	7	2.02		Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1	420,000,000	1 Dokumen	441,000,000	1	463,050,000	3 Dokumen	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	7	2.02	1	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1	420,000,000	1 Dokumen	441,000,000	1	463,050,000	3 Dokumen	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan dan Kelukutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	700,000,000	100%	735,000,000	100%	771,750,000	100%	810,337,500	100%	3,017,087,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	8	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	0 Lembaga	0 Lembaga	1 Lembaga	700,000,000	1	735,000,000	1 Lembaga	771,750,000	1	810,337,500	4 Lembaga	3,017,087,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
								Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1		1 Dokumen		1		4 Dokumen			
								Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0 Orang	0 Orang	50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		200 Orang			

		2	11	8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	0 Lembaga	0 Lembaga	1 Lembaga	200,000,000	1 Lembaga	210,000,000	1 Lembaga	220,500,000	1 Lembaga	231,525,000	4 Lembaga	862,025,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Masyarakat/Institusi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	315,000,000	1 Dokumen	330,750,000	1 Dokumen	347,287,500	4 Dokumen	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	8	2.01	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0 Orang	0 Orang	50 Orang	200,000,000	50 Orang	210,000,000	50 Orang	220,500,000	50 Orang	231,525,000	200 Orang	862,025,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan	10 %	10 %	10 %	400,000,000	10 %	420,000,000	10 %	441,000,000	10 %	463,050,000	10 %	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	9	2.01		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	1 Entitas	1 Entitas	400,000,000	1 Entitas	420,000,000	1 Entitas	441,000,000	1 Entitas	463,050,000	4 Entitas	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	1 Entitas	1 Entitas	400,000,000	1 Entitas	420,000,000	1 Entitas	441,000,000	1 Entitas	463,050,000	1 Entitas	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun	43.939,92 Ton/Tahun	43.939,92 Ton/Tahun	45.473,62 Ton/Tahun	15,000,000,000	45.746 Ton/Tahun	15,750,000,000	46.007,22 Ton/Tahun	16,537,500,000	46.467,29 Ton/Tahun	17,364,375,000	46.467,29 Ton/Tahun	64,651,875,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
								Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen				1 Dokumen		4 Dokumen			
								Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan				1 Laporan		4 Laporan			
								Jumlah Sampah yang Digiath, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	43.939,92 Ton/Tahun	43.939,92 Ton/Tahun	45.473,62 Ton/Tahun		45.746 Ton/Tahun		46.007,22 Ton/Tahun		46.467,29 Ton/Tahun		46.467,29 Ton/Tahun			

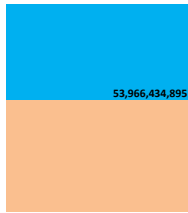
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000,000	1 Dokumen	8,400,000,000	1 Dokumen	8,820,000,000	1 Dokumen	9,261,000,000	4 Dokumen	34,481,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
2	11	11	2.01	6	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	420,000,000	1 Dokumen	441,000,000	1 Dokumen	463,050,000	4 Dokumen	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0 Unit	0 Unit	2 Unit	550,000,000	2 Unit	577,500,000	2 Unit	606,375,000	2 Unit	636,693,750	8 Unit	2,370,568,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
2	11	11	2.02		Kegiatan Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	350,000,000	1 Rekomendasi	367,500,000	1 Rekomendasi	385,875,000	1 Rekomendasi	405,168,750	4 Rekomendasi	1,508,543,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
2	11	11	2.02	5	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	350,000,000	1 Rekomendasi	367,500,000	1 Rekomendasi	385,875,000	1 Rekomendasi	405,168,750	4 Rekomendasi	1,508,543,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
2	11	11	2.03		Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah		180 buah	180 buah	30 buah		30 buah	30 buah		30 buah		120 Buah			Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
					Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1,600,000,000	1 Unit	1,680,000,000	1 Unit	1,764,000,000	1 Unit	1,852,200,000	4 Unit	6,896,200,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		4 Laporan			Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat

2	11	11	2.03	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait lain Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait lain Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	180 buah	180 buah	30 buah	300,000,000	30 buah	315,000,000	30 buah	330,750,000	30 buah	347,287,500	30 buah	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
2	11	11	2.03	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,050,000,000	1 Unit	1,102,500,000	1 Unit	1,157,625,000	4 Unit	4,310,125,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
2	11	11	2.03	3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	315,000,000	1 Laporan	330,750,000	1 Laporan	347,287,500	4 Laporan	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
JUMLAH										47,949,692,850		49,902,177,493		51,676,161,367		54,480,469,435		204,008,501,145		
																		204,008,501,145		

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

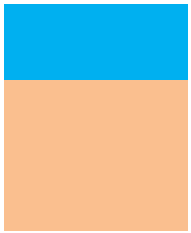


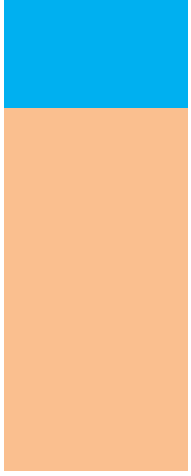
MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19730912 199903 1 003













Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				2027	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
1	2	3					4	5	6	7	8		9		10		11		12		13	14	
Meningkatkan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Bidang Urusan Yang Dilaksanakan	81,94%*	81,94%*	81,96%	12,469,692,850	81,97%	13,093,177,493	81,98%	13,747,836,367	81,99%	14,655,728,185		81,99%	53,966,434,895	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	76 Dokumen	76 Dokumen	28 Dokumen	66,581,000	25 Dokumen	69,910,050	28 Dokumen	73,405,553	28 Dokumen	77,075,830		100%	286,972,433	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	40 Dokumen	11 Dokumen	25,939,000	11 Dokumen	27,235,950	11 Dokumen	28,597,748	11 Dokumen	30,027,635	33,030,398	44 Dokumen	111,800,332	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	4,725,000	1 Dokumen	4,961,250	1 Dokumen	5,209,313	5,730,244	4 Dokumen	19,395,563	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,200,000	1 Dokumen	4,410,000	1 Dokumen	4,630,500	5,093,550	4 Dokumen	17,240,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,200,000	1 Dokumen	4,410,000	1 Dokumen	4,630,500	5,093,550	4 Dokumen	17,240,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,200,000	1 Dokumen	4,410,000	1 Dokumen	4,630,500	5,093,550	4 Dokumen	17,240,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	4,000,000	2 Laporan	4,200,000	2 Laporan	4,410,000	2 Laporan	4,630,500	5,093,550	8 Laporan	17,240,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	20,142,000	12 Laporan	21,149,100	12 Laporan	22,206,555	12 Laporan	23,316,883	25,648,571	48 Laporan	86,814,538	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku

		2	11	1	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3,206,403,200	4 Dokumen	3,366,723,360	4 Dokumen	3,535,059,528	4 Dokumen	3,711,812,504	4 Dokumen	13,819,998,592	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku		
		2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	35 orang	36 orang	3,196,553,200	36 orang	3,356,380,860	36 orang	3,524,199,903	36 orang	3,700,409,898	4,070,450,888	36 orang	13,777,543,861	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1Laporan	3,500,000	2 Laporan	3,675,000	2 Laporan	3,858,750	2 Laporan	4,051,688	4,456,856	8 Laporan	15,085,438	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	18 Laporan	3,350,000	18 Laporan	3,517,500	18 Laporan	3,693,375	18 Laporan	3,878,044	4,265,848	72 Laporan	14,438,919	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,150,000	1 Dokumen	3,307,500	1 Dokumen	3,472,875	3,820,163	4 Dokumen	12,930,375	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.03		Kegiatan administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	13,081,800	1 Dokumen	13,735,890	1 Dokumen	14,422,685	1 Dokumen	15,143,819		4 Dokumen	56,384,193	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	13,081,800	1 Dokumen	13,735,890	1 Dokumen	14,422,685	1 Dokumen	15,143,819	16,658,201	4 Dokumen	56,384,193	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	190,334,000	1 Dokumen	199,850,700	1 Dokumen	209,843,235	1 Dokumen	220,335,397		1 Dokumen	820,363,332	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	1 paket	150,000,000	1 paket	157,500,000	1 paket	165,375,000	1paket	173,643,750	191,008,125	4 Paket	646,518,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
			11	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	20,834,000	4 Dokumen	21,875,700	4 Dokumen	22,969,485	1 Dokumen	24,117,959	26,529,755	16 Dokumen	89,797,144	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	2 orang	19,500,000	2 orang	20,475,000	2 orang	21,498,750	2 orang	22,573,688	24,831,056	8 orang	84,047,438	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	8 Paket	8 Paket	8 Paket	337,627,600	8 Paket	354,508,980	8 Paket	372,234,429	8 Paket	390,846,150		8 Paket	1,455,217,159	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	12 Paket	2,773,600	12 Paket	2,912,280	12 Paket	3,057,894	12 Paket	3,210,789	3,531,868	48 Paket	11,954,563	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1 Paket	25,100,000	1 Paket	26,355,000	1 Paket	27,672,750	1 Paket	29,056,388	31,962,026	4 Paket	108,184,138	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2 Paket	66,020,000	2 Paket	69,321,000	2 Paket	72,787,050	2 Paket	76,426,403	84,069,043	8 Paket	284,554,453	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku

2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	7,860,000	6 Dokumen	8,253,000	6 Dokumen	8,665,650	6 Dokumen	9,098,933	10,008,826	24 Dokumen	33,877,583	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5,848,000	12 Laporan	6,140,400	12 Laporan	6,447,420	12 Laporan	6,769,791	7,446,770	48 Laporan	25,205,611	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	230,026,000	12 Laporan	241,527,300	12 Laporan	253,603,665	12 Laporan	266,283,848	292,912,233	60 Laporan	991,440,813	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	7 unit	7 unit	7 unit	3,924,561,000	7 unit	4,120,789,050	7 unit	4,326,828,503	7 unit	4,763,669,928		28 unit	17,135,848,480	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	700,000,000	1 Unit	735,000,000	1 Unit	771,750,000	1 Unit	810,337,500	891,371,250	4 Unit	3,017,087,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,050,000,000	1 Unit	1,102,500,000	1 Unit	1,267,875,000	1,394,662,500	4 Unit	4,420,375,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07	4	Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkut Darat Tak Bermotor yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,050,000,000	1 Unit	1,102,500,000	1 Unit	1,267,875,000	1,394,662,500	4 Unit	4,420,375,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	3 Unit	24,561,000	1 Unit	25,789,050	1 Unit	27,078,503	1 Unit	28,432,428	31,275,670	7Unit	105,860,980	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	200,000,000	1 Unit	210,000,000	1 Unit	220,500,000	1 Unit	231,525,000	254,677,500	4 Unit	862,025,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	500,000,000	1 Unit	525,000,000	1 Unit	551,250,000	1 Unit	578,812,500	636,693,750	4 Unit	2,155,062,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	500,000,000	1 Unit	525,000,000	1 Unit	551,250,000	1 Unit	578,812,500	636,693,750	4 Unit	2,155,062,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Sub Organisasi	6 Sub Organisasi	6 Sub Organisasi	3,644,082,050	6 Sub Organisasi	3,826,286,153	6 Sub Organisasi	4,017,600,460	6 Sub Organisasi	4,218,480,483		6 Sub Organisasi	15,706,449,146	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	3,150,000	12 Laporan	3,307,500	12 Laporan	3,472,875	3,820,163	48 Laporan	12,930,375	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	84 Laporan	3,461,300,000	84 Laporan	3,634,365,000	84 Laporan	3,816,083,250	84 Laporan	4,006,887,413	4,407,576,154	336 Laporan	14,918,635,663	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	52,500,000	1 Laporan	55,125,000	1 Laporan	57,881,250	63,669,375	4 Laporan	215,506,250	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	129,782,050	12 Laporan	136,271,153	12 Laporan	143,084,710	12 Laporan	150,238,946	165,262,840	48 Laporan	559,376,858	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku

		2	11	1	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	25 Unit	25 Unit	20 Unit	1,100,104,000	19 Unit	1,155,109,200	19 Unit	1,212,864,660	19 Unit	1,273,507,893	19 Unit	4,741,585,753	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku		
		2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	25 Unit	300,000,000	25 Unit	315,000,000	25 Unit	330,750,000	25 Unit	347,287,500	382,016,250	19 Unit	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	
		2	11	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah Alat Besar yang Terpelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	1 Unit	250,000,000	1 Unit	262,500,000	1 Unit	275,625,000	1 Unit	289,406,250	318,346,875	4 Unit	1,077,531,250	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	
		2	11	1	2.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkut	0 Unit	0 Unit	1 Unit	250,000,000	1 Unit	262,500,000	1 Unit	275,625,000	1 Unit	289,406,250	318,346,875	4 Unit	1,077,531,250	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	
		2	11	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	200,000,000	1 Unit	210,000,000	1 Unit	220,500,000	1 Unit	231,525,000	254,677,500	4 Unit	862,025,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	
		2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	3 Unit	12,434,000	2 Unit	13,055,700	2 Unit	13,708,485	2 Unit	14,393,909	15,833,300	8 Unit	53,592,094	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	
		2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	87,670,000	2 Gedung	92,053,500	2 Gedung	96,656,175	2 Gedung	101,488,984	111,637,882	2 Gedung	377,868,659	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	
		2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penuhannya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten	100%	100%	100%	2,350,000,000	100%	2,022,500,000	100%	1,102,500,000	100%	1,157,625,000	100%	6,632,625,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat		
		2	11	2	2.01		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Akademi dan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	472,500,000	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	922,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
		2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	472,500,000	0 Dokumen	0	0	0	0	0	2 Dokumen	922,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	2	2:02		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1,900,000,000	3 Dokumen	1,550,000,000	2 Dokumen	1,102,500,000	2 Dokumen	1,157,625,000	9 Dokumen	5,710,125,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat		
		2	11	2	2:02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	525,000,000	1 Dokumen	551,250,000	1 Dokumen	578,812,500	636,693,750	4 Dokumen	2,155,062,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
		2	11	2	2:02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	900,000,000	1 Dokumen	500,000,000	0 Dokumen	0	0	0	0	0	3 Dokumen	1,400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat

		2	11	2	2:02	3	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	525,000,000	1 Dokumen	551,250,000	1 Dokumen	578,812,500	636,693,750	4 Dokumen	2,155,062,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2	11	3			Indeks Kualitas Air (IKA)	60.00 Point	60.00 Point	58.54 Point	1,480,000,000	58.64 Point	1,554,000,000	58.74 Point	1,631,700,000	58.84 Point	1,713,285,000	636,693,750	58.84 Point	6,378,985,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
							Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.73 Point	84.73 Point	84.04 Point		84.14 Point		84.24 Point		84.34 Point			Dinas Lingkungan Hidup				
	Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2	11	3	2.01		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,180,000,000	1 Dokumen	1,239,000,000	1 Dokumen	1,300,950,000	1 Dokumen	1,365,997,500	636,693,750	4 Dokumen	5,085,947,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen									
							Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen									
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	2	11	3	2.01	1	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	315,000,000	1 Dokumen	330,750,000	1 Dokumen	347,287,500	382,016,250	4 Dokumen	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	420,000,000	1 Dokumen	441,000,000	1 Dokumen	463,050,000	509,355,000	4 Dokumen	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
							Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	480,000,000	1 Dokumen	504,000,000	1 Dokumen	529,200,000	1 Dokumen	555,660,000	611,226,000	4 Dokumen	2,068,860,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
	Kegiatan Pengulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2	11	3	2.02		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	315,000,000	1 Laporan	330,750,000	1 Laporan	347,287,500	636,693,750	4 Laporan	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	

		2	11	3	2.02	1	Pemberian Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	315,000,000	1 Laporan	330,750,000	1 Laporan	347,287,500	382,016,250	4 Laporan	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	41.63 Point	41.63 Point	45.38 Point	13,800,000,000	47.86 Point	14,490,000,000	50.34 Point	15,214,500,000	52.82 Point	15,975,225,000		52.82 Point	59,479,725,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
		2	11	4	2.01			Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Ha	8 Ha	8 Ha		8 Ha	8 Ha	8 Ha	8 Ha	8 Ha	8 Ha	8 Ha	8 Ha				
								Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	42.26 Ha	42.26 Ha	42.26 Ha		43.26 Ha	44.26 Ha	45.26 Ha	45.26 Ha	45.26 Ha	45.26 Ha	45.26 Ha	45.26 Ha				
								Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.1 Ha	2.1 Ha	2.1 Ha	13,800,000,000	2.8 Ha	14,490,000,000	3.53 Ha	15,214,500,000	4.2 Ha	15,975,225,000		4.2 Ha	59,479,725,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
								jumlah orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	0 Orang	0 Orang	1 Orang		1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang				
								Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	0 Unit	0 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit				
		2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Ha	8 Ha	8 Ha	750,000,000	8 Ha	787,500,000	8 Ha	826,875,000	8 Ha	868,218,750	955,040,625	8 Ha	3,232,593,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
		2	11	4	2.01	3	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	42.26 Ha	42.26 Ha	42.26 Ha	2,000,000,000	43.26 Ha	2,100,000,000	44.26 Ha	2,205,000,000	45.26 Ha	2,315,250,000	2,546,775,000	45.26 Ha	8,620,250,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
		2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.1 Ha	2.1 Ha	2.1 Ha	10,000,000,000	2.8 Ha	10,500,000,000	3.53 Ha	11,025,000,000	4.2 Ha	11,576,250,000	12,733,875,000	4.2 Ha	43,101,250,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
		2	11	4	2.01	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	0 Orang	0 Orang	1 Orang	300,000,000	1 Orang	315,000,000	1 Orang	330,750,000	1 Orang	347,287,500	382,016,250	4 Orang	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
		2	11	4	2.01	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	0 Unit	0 Unit	1 Unit	750,000,000	1 Unit	787,500,000	1 Unit	826,875,000	1 Unit	868,218,750	955,040,625	1 Unit	3,232,593,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
		2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	20%	20%	20%	400,000,000	25%	420,000,000	30%	441,000,000	35%	463,050,000		35%	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	

		2	11	5	2.01		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	420,000,000	1 Dokumen	441,000,000	1 Dokumen	463,050,000		4 Dokumen	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
								Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan			4 Laporan			
		2	11	5	2.01	1	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	210,000,000	1 Dokumen	220,500,000	1 Dokumen	231,525,000	254,677,500	1 Dokumen	862,025,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	5	2.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	210,000,000	1 Laporan	220,500,000	1 Laporan	231,525,000	254,677,500	4 Laporan	862,025,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pemegang Izin Lingkungan	80%	80%	80%	950,000,000	80%	997,500,000	80%	1,047,375,000	80%	1,099,743,750		80%	4,094,618,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	6	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Sarat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0 Orang	0 Orang	20 Orang		20 Orang	20 Orang	20 Orang					80 Orang			

						dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	20 Laporan	950,000,000	20 Laporan	997,500,000	20 Laporan	1,047,375,000	20 Laporan	1,099,743,750		40 Laporan	4,094,618,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			4 Dokumen			
		2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	315,000,000	1 Dokumen	330,750,000	1 Dokumen	347,287,500	382,016,250	4 Dokumen	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	6	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	0 Orang	0 Orang	20 Orang	100,000,000	20 Orang	105,000,000	20 Orang	110,250,000	20 Orang	115,762,500	127,338,750	80 Orang	431,012,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	20 Laporan	300,000,000	20 Laporan	315,000,000	20 Laporan	330,750,000	20 Laporan	347,287,500	382,016,250	80 Laporan	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	6	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	262,500,000	1 Dokumen	275,625,000	1 Dokumen	289,406,250	318,346,875	4 Dokumen	1,077,531,250	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0%	0%	1%	400,000,000	1%	420,000,000	2%	741,000,000	2%	778,050,000		2%	2,339,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
		2	11	7	2.01		Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	315,000,000		2 Dokumen	615,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat

		2	11	7	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen	0	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	315,000,000	346,500,000	2 Dokumen	615,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
		2	11	7	2.02		Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	420,000,000	1 Dokumen	441,000,000	1 Dokumen	463,050,000		3 Dokumen	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
		2	11	7	2.02	1	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	420,000,000	1 Dokumen	441,000,000	1 Dokumen	463,050,000	509,355,000	3 Dokumen	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
		2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan dan Kelengkapan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	700,000,000	100%	735,000,000	100%	771,750,000	100%	810,337,500		100%	3,017,087,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
		2	11	8	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Peduli dan Berbudaya Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	0 Lembaga	0 Lembaga	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga					4 Lembaga			
								Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	735,000,000	1 Dokumen	771,750,000	1 Dokumen	810,337,500			4 Dokumen	3,017,087,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
								Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0 Orang	0 Orang	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang					200 Orang			


						2	11	8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdafar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	0 Lembaga	0 Lembaga	1 Lembaga	200,000,000	1 Lembaga	210,000,000	1 Lembaga	220,500,000	1 Lembaga	231,525,000	254,677,500	4 Lembaga	862,025,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
						2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Masyarakat/Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	315,000,000	1 Dokumen	330,750,000	1 Dokumen	347,287,500	382,016,250	4 Dokumen	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
						2	11	8	2.01	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0 Orang	0 Orang	50 Orang	200,000,000	50 Orang	210,000,000	50 Orang	220,500,000	50 Orang	231,525,000	254,677,500	200 Orang	862,025,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
						2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan	10 %	10 %	10 %	400,000,000	10 %	420,000,000	10 %	441,000,000	10 %	463,050,000		10 %	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
						2	11	9	2.01		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	1 Entitas	1 Entitas	400,000,000	1 Entitas	420,000,000	1 Entitas	441,000,000	1 Entitas	463,050,000		4 Entitas	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
						2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	1 Entitas	1 Entitas	400,000,000	1 Entitas	420,000,000	1 Entitas	441,000,000	1 Entitas	463,050,000	509,355,000	1 Entitas	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan					2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun	43.939,92 Ton/Tahun	43.939,92 Ton/Tahun	45.473,62 Ton/Tahun	15,000,000,000	45.746 Ton/Tahun	15,750,000,000	46.007,22 Ton/Tahun	16,537,500,000	46.467,29 Ton/Tahun	17,364,375,000		46.467,29 Ton/Tahun	64,651,875,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat	
											Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen			4 Dokumen				
											Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan			1 Laporan			4 Laporan				
											Jumlah Sampah yang Diginal, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	43.939,92 Ton/Tahun	43.939,92 Ton/Tahun	45.473,62 Ton/Tahun		45.746 Ton/Tahun		46.007,22 Ton/Tahun		46.467,29 Ton/Tahun				46.467,29 Ton/Tahun				

							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0 Kelompok	0 Kelompok	2 Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	8 Kelompok						
	2	11	11	2.01		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	13,050,000,000	13,702,500,000	14,387,625,000	15,107,006,250		56,247,131,250	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat			
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen						4 Dokumen					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0 Unit	0 Unit	2 Unit						8 Unit					
	2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	367,500,000	385,875,000	405,168,750	445,685,625	1 Dokumen	1,508,543,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat		
	2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	315,000,000	330,750,000	347,287,500	382,016,250	1 Laporan	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat		
	2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	43.939,92 Ton/Tahun	43.939,92 Ton/Tahun	45.473,62 Ton/Tahun	3,000,000,000	3,150,000,000	3,307,500,000	3,472,875,000	3,820,162,500	46.467,29 Ton/Tahun	12,930,375,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat		
	2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0 Kelompok	0 Kelompok	2 Kelompok	450,000,000	472,500,000	496,125,000	520,931,250	573,024,375	8 Kelompok	1,939,556,250	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat		

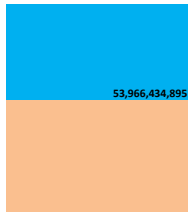
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000,000	1 Dokumen	8,400,000,000	1 Dokumen	8,820,000,000	1 Dokumen	9,261,000,000	10,187,100,000	4 Dokumen	34,481,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
2	11	11	2.01	6	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	420,000,000	1 Dokumen	441,000,000	1 Dokumen	463,050,000	509,355,000	4 Dokumen	1,724,050,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0 Unit	0 Unit	2 Unit	550,000,000	2 Unit	577,500,000	2 Unit	606,375,000	2 Unit	636,693,750	700,363,125	8 Unit	2,370,568,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
2	11	11	2.02		Kegiatan Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	350,000,000	1 Rekomendasi	367,500,000	1 Rekomendasi	385,875,000	1 Rekomendasi	405,168,750		4 Rekomendasi	1,508,543,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
2	11	11	2.02	5	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	350,000,000	1 Rekomendasi	367,500,000	1 Rekomendasi	385,875,000	1 Rekomendasi	405,168,750	445,685,625	4 Rekomendasi	1,508,543,750	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
2	11	11	2.03		Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah		180 buah	180 buah	30 buah		30 buah		30 buah	30 buah				120 Buah			
					Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Pelaksanaan Kinerja	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1,600,000,000	1 Unit	1,680,000,000	1 Unit	1,764,000,000	1 Unit	1,852,200,000		4 Unit	6,896,200,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan				4 Laporan			

2	11	11	2.03	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	180 buah	180 buah	30 buah	300,000,000	30 buah	315,000,000	30 buah	330,750,000	30 buah	347,287,500	382,016,250	30 buah	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
2	11	11	2.03	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,050,000,000	1 Unit	1,102,500,000	1 Unit	1,157,625,000	1,273,387,500	4 Unit	4,310,125,000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
2	11	11	2.03	3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	315,000,000	1 Laporan	330,750,000	1 Laporan	347,287,500	382,016,250	4 Laporan	1,293,037,500	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Lampung Barat
JUMLAH										47,949,692,850	49,902,177,493	51,676,161,367	54,480,469,435	204,008,501,145	204,008,501,145						

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

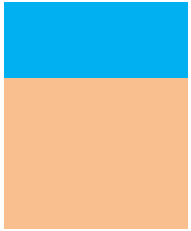


MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19730912 199903 1 003













**Persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11						29,360,401,937						30,354,422,036		
2	11	01											81,96 %	10,089,235,696	
2	11	01	2.01										28 Dokumen	35,237,475	
2	11	01	2.01	01									11 Dokumen	9,026,850	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	02									1 Dokumen	3,795,750	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	03									1 Dokumen	3,186,750	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	04									1 Dokumen	3,265,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	05									1 Dokumen	2,850,750	Dinas Lingkungan Hidup

**Persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3,000,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9,487,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	9,961,875	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	16 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	2,986,302,200						4 Dokumen	3,135,617,310	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	2,979,540,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35 Orang/bulan	3,128,517,210	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,153,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	3,310,650	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1,327,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1,393,350	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2,282,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,396,100	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	37,348,750						1 Dokumen	39,216,188	

**Persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	20,820,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	21,861,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	16,528,750	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Orang	17,355,188	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum	32 Paket		0 Paket	8 Paket	249,136,600						8 Paket	261,593,430	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,773,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	2,912,280	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22,905,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	24,050,250	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7,860,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,253,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2,826,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2,967,300	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	212,772,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	223,410,600	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	28 Unit		0 Unit	7 Unit	23,100,000						7 Unit	24,255,000	

**Persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	23,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	2 Unit	24,255,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daeah	24 Organisasi		0 Organisasi	6 Organisasi	6,015,639,350						6 Organisasi	6,316,421,318	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,300,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2,415,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5,861,300,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	6,154,365,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	22,595,350	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	23,725,118	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	129,444,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	135,916,200	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	80 Unit		0 Unit	20 Unit	263,709,500						20 Unit	276,894,975	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	146,357,500	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Unit	153,675,375	Dinas Lingkungan Hidup

**Persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	10,584,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	11,113,200	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	106,768,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	112,106,400	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten	100 %		0 %	100 %	157,626,000					100 %	165,507,300		
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	157,626,000					1 Dokumen	165,507,300		
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	157,626,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur	1 Dokumen	165,507,300	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	58,84 point 84.34 point		0 point 0 point	58,54 point 84.04 point	1,031,063,760					58,54 point 84.04 point	711,616,948		

**Persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen		0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	958,871,760						1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	635,815,348	
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	159,630,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten	1 Dokumen	167,611,500	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	393,123,460	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten	1 Dokumen	41,779,633	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	406,118,300	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten	1 Dokumen	426,424,215	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	72,192,000					1 Laporan	75,801,600		

**Persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	72,192,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Tersedianya informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 Laporan	75,801,600	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	52.82 point		0 point	45.38 point	9,102,199,512						45.38 point	9,557,309,488	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang 4 Unit 4.2 Ha 45.26 Ha 8 Ha		0 Orang 0 Unit 0 Ha 0 Ha 0 Ha	1 Orang 1 Unit 2.1 Ha 42.26 Ha 8 Ha	9,102,199,512						1 Orang 1 Unit 2.1 Ha 42.26 Ha 8 Ha	9,557,309,488	
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Ha	347,237,411	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	8 Ha	364,599,282	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				42.26 Ha	1,572,556,821	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	42.26 Ha	1,651,184,662	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2.1 Ha	7,129,811,345	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	2.1 Ha	7,486,301,912	Dinas Lingkungan Hidup

**Persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				1 Orang	52,593,935	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	1 Orang	55,223,632	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	35 %		0 %	20 %	106,233,200					20 %	111,544,860		
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitas Persetujuan/izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 Dokumen 4 Laporan		0 Dokumen 0 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	106,233,200					1 Dokumen 1 Laporan	111,544,860		
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	65,085,600	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Penyimpanan Sementara Limbah B3	1 Dokumen	68,339,880	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				0 Laporan	41,147,600	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Penyimpanan Sementara Limbah B3	0 Laporan	43,204,980	Dinas Lingkungan Hidup	

**Persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	%		%	20 %	109,228,675						20 %	11,690,109	
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 Dokumen 80 Laporan 80 Laporan		0 Dokumen 0 Laporan 0 Laporan	1 Dokumen 20 Laporan 20 Laporan	109,228,675						1 Dokumen 20 Laporan 20 Laporan	11,690,109	
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				20 Laporan	109,228,675	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	20 Laporan	11,690,109	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	2 %		0 %	1 %	102,909,610						1 %	108,055,091	

**Persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	102,909,610						1 Dokumen	108,055,091	
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	102,909,610	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	108,055,091	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %		0 %	100 %	95,000,075						100 %	99,750,079	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Terkait PPLH Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	4 Lembaga 200 Orang 4 Dokumen		0 Lembaga 0 Orang 0 Dokumen	1 Lembaga 50 Orang 1 Dokumen	95,000,075						1 Lembaga 50 Orang 1 Dokumen	99,750,079	

**Persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	95,000,075	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	1 Dokumen	99,750,079	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan	10 %		0 %	10 %	149,825,005					10 %	157,316,255		
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	4 Entitas		0 Entitas	1 Entitas	149,825,005					1 Entitas	157,316,255		
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	149,825,005	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Entitas	157,316,255	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun	46.467,29 Ton/Tahun		0 Ton/Tahun	45.473,62 Ton/Tahun	8,897,520,200					45.473,62 Ton/Tahun	9,342,396,210		

**Persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan 8 Kelompok		0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Laporan 0 Kelompok	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 2 Kelompok		8,897,520,200					1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 2 Kelompok	9,342,396,210	
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	216,994,675	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	227,844,409	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				1 Laporan	108,193,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	1 Laporan	113,602,650	Dinas Lingkungan Hidup

**Persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						2,086,328,675	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Pengelolaan Sampah		2,190,645,109	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	37,343,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	2 Kelompok	39,210,150	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	6,041,823,285	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	6,343,914,449	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				2 Unit	406,837,565	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Memantapkan kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	2 Unit	427,179,443	Dinas Lingkungan Hidup
TOTAL							29,360,401,937							30,354,422,036	